



BUPATI PULAU MOROTAI  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI  
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR  
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PULAU MOROTAI

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan Pegawai ASN Daerah ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Rumah Sakit Umum Daerah Dan Kecamatan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan di gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
10. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai ASN adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai.
11. Prestasi Kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan.
12. Presensi adalah kehadiran kerja pegawai yang dibuktikan dengan tata absensi yang terekam pada sistem presensi integrasi.
13. Sistem Presensi Terintegrasi adalah suatu sistem presensi yang berfungsi untuk memonitoring kehadiran pegawai melalui titik koordinat dan foto selfy di tempat kerja sehingga waktu kehadiran baik masuk maupun keluar pegawai dapat tercatat secara cepat dan tepat.
14. Tugas Pokok adalah tugas utama yang merupakan penjabaran langsung dari fungsi dan tugas organisasi, sebagaimana dinyatakan dalam rincian tugas jabatan yang bersangkutan.
15. Tugas Tambahan adalah tugas yang pada dasarnya tidak dinyatakan dalam rincian tugas jabatan PNS/CPNS yang bersangkutan, tetapi memberikan manfaat bagi unit kerja atau OPD tempat PNS/CPNS yang bersangkutan bertugas atau OPD tempat PNS/CPNS yang bersangkutan ditugaskan.
16. Sistem Aplikasi Kinerja adalah suatu media aplikasi berbasis website yang berguna untuk mempermudah pembuatan penilaian laporan capaian kinerja ASN.
17. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS dalam masa kinerja.

18. Masa Kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal akhir bulan berkenaan.
19. Bobot Pekerjaan adalah nilai kumulatif dari faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang suatu pekerjaan/jabatan.
20. Point adalah suatu penilaian terhadap unsur penilaian prestasi kerja.
21. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjut disingkat SKP adalah rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati oleh Pegawai dan atasannya yang diisi secara online melalui sistem aplikasi kinerja.
22. Capaian Kinerja Bulanan adalah hasil kerja atau realisasi pencapaian kinerja bulanan berdasarkan rekapitulasi catatan kinerja harian pegawai.
23. Capaian Kinerja Harian Pegawai adalah catatan harian dalam satu bulan yang membuat aktivitas kerja dan pelaksanaan tugas pokok Pegawai yang diisi secara *online* melalui sistem kinerja berdasarkan SKP bulanan pegawai.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai bentuk pedoman dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dengan pemberian tambahan penghasilan yang merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi Aparatur Sipil Negara.
- (2) Tujuannya adalah:
  - a. Meningkatkan disiplin dan mengembangkan budaya kerja inovasi di lingkungan Perangkat Daerah;
  - b. Menumbuhkan motivasi pegawai ASN dalam bekerja dan;
  - c. Peningkatan kinerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang Lingkup Pedoman Pemberian TPP ASN yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Prinsip-prinsip pemberian TPP ASN;
- b. Kreteria pemberian TPP ASN;
- c. Persyaratan pemberian TPP ASN;
- d. Mekanisme penetapan pemberian TPP ASN;
- e. Penetapan besaran TPP ASN;
- f. Pemberian dan pengurangan TPP ASN kepada tiap pegawai ASN;
- g. Penilaian TPP ASN;
- h. Kelalaian.

### BAB IV PRINSIP-PRINSIP PEMBERIAN TPP ASN

#### Pasal 4

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Kepastian hukum:  
dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
- 2) Akuntabel:  
dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Proporsionalitas:  
dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
- 4) Efektif dan efisien:  
dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- 5) Keadilan dan kesetaraan:  
dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN.
- 6) Kesejahteraan:  
dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN.

7) Optimalisasi:

dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB V  
KRITERIA PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai dapat diberikan TPP, berdasarkan kelas jabatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. TPP Berdasarkan Beban Kerja;
  - b. TPP berdasarkan Prestasi Kerja;
  - c. TPP berdasarkan Kondisi Kerja;
  - d. TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi.

Paragraf 1  
TPP Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 6

- (1) Kriteria TPP PNS berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima ) jam perbulan.
- (2) Besaran TPP PNS berdasarkan beban kerja sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2  
TPP Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 7

- (1) Kriteria TPP PNS berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Besaran TPP PNS berdasarkan prestasi kerja sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3  
TPP Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 8

- (1) Kriteria TPP PNS berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Besaran TPP PNS berdasarkan kondisi kerja sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

Paragraf 4  
TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 9

- (1) Kriteria TPP PNS berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d diberikan kepada PNS dan non PNS yang melaksanakan tugas sebagai Dokter Spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
- (2) Besaran TPP PNS berdasarkan kelangkaan profesi, besarnya di atur dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
PENGHITUNGAN BESARAN TPP PNS

Pasal 10

- (1) Besaran TPP PNS diperoleh dari basic TPP PNS dengan mempertimbangkan TPP PNS berdasarkan beban kerja, TPP PNS berdasarkan prestasi kerja, TPP PNS berdasarkan kondisi kerja, dan/atau TPP PNS berdasarkan kelangkaan profesi.
- (3) Besaran Basic TPP PNS untuk setiap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat dari aplikasi [simona.kemendagri.go.id](http://simona.kemendagri.go.id), dihitung dengan rumus sebagai berikut :  
$$\text{Basic TPP PNS} = (\text{Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan}) \times (\text{Indeks Kapasitas Fiskal Daerah}) \times (\text{Indeks Kemahalan Konstruksi}) \times (\text{Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah/IPPD}).$$
- (4) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan yang telah disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

- (5) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan keuangan daerah berdasarkan Peta Kapasitas Fiskal Daerah (KFD), untuk Kabupaten Pulau Morotai dengan indeks KFD sebesar 0,345 (nol koma tiga ratus empat puluh lima) termasuk kategori sangat renda dengan nilai bobot 0.55 (nol koma lima puluh lima);
- (6) Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Pulau Morotai dengan nilai 108,60;
- (7) Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
- (a). Komponen variabel pengungkit yang terdiri atas :
1. Opini Laporan Keuangan berdasarkan Laporan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2021, Kabupaten Pulau Morotai mendapatkan kategori WTP;
  2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Kabupaten Pulau Morotai mencapai skor kinerja IPPD daerah kriteria tinggi;
  3. Kematangan Penataan Perangkat Daerah, Kabupaten Pulau Morotai mendapat skor dengan nilai kematangan sangat tinggi;
  4. Indeks Inovasi Daerah, Kabupaten Pulau Morotai mendapatkan kategori Indeks Inovasi Daerah dengan nilai 1-300;
  5. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah, dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kabupaten Pulau Morotai masuk dalam kategori rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,9-1,00 dengan prestasi kerja baik (B);
  6. Rasio Belanja Perjalanan Dinas dengan bobot 2% (dua persen), dihitung berdasarkan persentase belanja perjalanan dinas terhadap APBD diluar Belanja Pegawai, Kabupaten Pulau Morotai masuk kategori Besaran dibawah atau sama dengan 2%; dan
  7. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah untuk Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020 masuk kategori Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 51-60;
- (b). Komponen variable hasil, terdiri atas:
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kabupaten Pulau Morotai, mendapatkan nilai 60 s.d 69;



2. Indeks Gini Ratio, Kabupaten Pulau Morotai mendapatka nilai sama dengan atau diatas 0,5 masuk kategori indek sangat rendah;
- (8) Besaran Basic TPP PNS untuk setiap nama Jabatan sebagaimana lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V TIM PELAKSANA TPP ASN

### Pasal 10

- (1) Kepala Daerah membentuk Tim pelaksanaan TPP ASN pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
- (2) Tim pelaksanaan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengklasifikasikan pejabat/unit kerja perangkat daerah ke dalam kriteria TPP ASN pada TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.
- (3) Tim pelaksanaan TPP ASN pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai dengan Ketua adalah Sekretaris Daerah serta sekurang-kurangnya terdiri dari unsur perangkat daerah yang membidangi, antara lain:
  - a. ASISTEN mempunyai tugas mengkoordinasi perhitungan prestasi dan beban kerja;
  - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP ASN Pemerintah Daerah;
  - c. Bagian Pemerintahan dan Organisasi mempunyai tugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
  - d. Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
  - e. Bagian Hukum Dan HAM mempunyai tugas menyusun perkara TPP ASN Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah;

- f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP ASN Pemerintah Daerah; dan
  - g. Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan TPP ASN pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tim wajib melihat unsur kerja berbasis azas kepatutan dan azas hukum.

## BAB VII PEMBERIAN TPP ASN

### Pasal 11

- (1) TPP diberikan kepada:
- (a). Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana, dan jabatan fungsional sesuai dengan kelas jabatannya masing-masing;
  - (b). Untuk jabatan pengawas yang disetarakan ke jabatan fungsional besaran TPPnya disesuaikan dengan besaran pada kelas jabatan pengawas;
  - (c). Non Pegawai Negeri Sipil khusus jabatan yang langkah seperti dokter spesialis.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan absensi dan penyampaian pembuatan SKP pada awal tahun dan capaian kinerja bulanan secara online yang telah diverifikasi dan disetujui oleh atasan langsung.

### Pasal 12

TPP tidak diberikan kepada Pegawai apabila:

- a. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
- b. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- d. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang terlibat dengan tindakan gratifikasi berupa menerima uang, bingkisan/parcel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan;

- e. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang melakukan penguasaan terhadap barang milik daerah untuk kepentingan pribadi;
- f. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang terbukti hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya;
- g. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
- h. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- i. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh atasan, tidak dibayarkan TPP bulan berikut dan TPP yang bersangkutan dikembalikan ke kas daerah;
- j. tidak menginput SKP dan target kinerja bulanan secara *online* dalam sistem aplikasi kinerja;
- k. Tidak melaksanakan Tugas dan fungsi dengan tanggungjawab;
- l. Lambat dalam kerja sehingga mengakibatkan kerugian daerah dan masyarakat;
- m. dianggap tidak layak oleh atasan.

## BAB VIII UNSUR-UNSUR TPP

### Pasal 13

- (1) TPP diberikan atas hasil penilaian kinerja yang terdiri dari unsur:
- a. produktifitas kerja; dan
  - b. disiplin kerja;
  - c. efektif kerja;
  - d. efisien anggaran dengan hasil maksimal;
  - e. jujur, rajin dan peduli;
- (2) Unsur Produktifitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki bobot 70% (tujuh puluh persen) dari hasil perhitungan TPP pada sistem aplikasi kinerja ditentukan dengan formula sebagai berikut:
- $$\text{Tunjangan Kinerja} = \text{bobot produktifitas Kerja} \times \text{nilai SKP}/100 \times \text{tunjangan dasar}$$

- (3) Produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai dari pencapaian target SKP yang dihitung berdasarkan realisasi catatan kinerja bulanan pada bulan berkenaan.
- (4) Unsur Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan bobot 30% (tiga puluh persen) dari hasil perhitungan TPP dihitung berdasarkan presentasi kehadiran yang diverifikasi oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah pada aplikasi kinerja ditentukan dengan formula sebagai berikut:  
$$\text{Tunjangan Disiplin} = \text{bobot disiplin kerja} \times \text{nilai absensi}/100 \times \text{tunjangan dasar}$$
- (5) Nilai maksimal untuk SKP dan absensi sebagaimana dimaksud pada formula yang terdapat pada ayat (2) dan ayat (4) adalah 100 (seratus).
- (6) Tunjangan dasar sebagaimana dimaksud pada formula yang terdapat pada ayat (2) dan ayat (4) adalah besar total tunjangan pegawai yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (7) Ketentuan pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) tidak berlaku apabila dalam melaksanakan tugas dianggap tidak patuh sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) huruf h, huruf i dan huruf j oleh atasan dan atau Pejabat Pembina Kepegawaian.

## BAB IX PENILAIAN KINERJA PEGAWAI ASN

### Paragraf 1 Penilaian Kinerja

#### Pasal 14

- (1) Penilaian terhadap kinerja pegawai ASN, dilakukan berdasarkan hasil presentasi dari unsur produktifitas kerja dan unsur disiplin kerja yang dihitung melalui sistem aplikasi kinerja.
- (2) Presentase unsur produktifitas kerja, dan unsur disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput melalui sistem aplikasi kinerja.
- (3) Pegawai ASN wajib melakukan penyusunan SKP dan target kinerja bulanan SKP berdasarkan:
  - a. Uraian tugas masing-masing jabatan.
  - b. Rencana kerja tahunan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan program bupati dan wakil bupati.
  - c. Perjanjian kinerja; dan
  - d. Tugas tambahan lainnya.

- (4) Wajib bekerja dengan berpedoman pada azas kepatutan dan azas hukum.
- (5) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disetujui dan divalidasi oleh atasan langsung/pejabat penilai.
- (6) Dalam hal SKP yang disusun oleh Pegawai tidak disetujui oleh atasan langsung/pejabat penilai maka keputusannya diserahkan kepada atasan pejabat penilai dan bersifat final.
- (7) Target kinerja bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setiap awal bulan masa penilaian kinerja dengan ketentuan minimal 22 (dua puluh dua) kegiatan bulanan dan menghasilkan 22 (dua puluh dua) laporan untuk mencapai nilai 100% (seratus persen) dengan memperhatikan output pekerjaan dan kualitas yang dihasilkan.
- (8) Untuk mencapai nilai 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka:
  - a. Setiap kegiatan harus diverifikasi sangat baik oleh pejabat penilai;
  - b. Bonus waktu 24% (dua puluh empat persen) jika pekerjaan terselesaikan sebelum target waktu yang telah ditentukan;
  - c. Setiap pegawai wajib menyelesaikan tugas yang didisposisikan oleh atasan melalui aplikasi sistem penilaian kinerja dengan bobot nilai 3 (tiga).
- (9) Jika terdapat alasan-alasan yang cukup, SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan peninjauan kembali sebelum penilaian kinerja dilakukan.
- (10) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7), wajib melampirkan bukti-bukti pendukung dan SKP sebelumnya serta persetujuan atasan langsung.

- (11) Dalam hal terjadi perpindahan Pegawai maka Pegawai yang bersangkutan tetap menyusun SKP sesuai dengan surat perintah melaksanakan atau surat perintah menduduki jabatan yang baru.
- (12) Ketentuan validasi oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi capaian kinerja individu Sekretaris Daerah.
- (13) Wajib mengisi LHKPN.

Paragraf 2  
Pedoman Penilaian SKP

Pasal 15

- (1) Nilai SKP dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut:
  - a. 91- ketas : sangat baik;
  - b. 76 - 90 : baik;
  - c. 61 - 75 : cukup;
  - d. 51 – 60 : kurang;
  - e. 50 – ke bawah : buruk.
- (2) Mengukur output pekerjaan berkualitas atau tidak untuk mendapatkan nilai sangat baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) huruf a, harus menggunakan pedoman sebagai berikut:

Kreteria Nilai	Keterangan
91 – 100	Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi dan pelayanan diatas standar yang ditentukan dan lain-lain.
76 – 90	Hasil kerja mempunyai 1 (satu) atau 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang ditentukan dan lain-lain.
61 – 75	Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan dan lain-lain.
51 – 60	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil, ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan dan lain-lain.
50 ke bawah	Hasil kerja mempunyai lebih dari 5 (lima) kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, kurang memuaskan, revisi, pelayanan di bawah standar yang ditentukan dan lain-lain

- (3) Pengukuran kualitas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan output yang dihasilkan.
- (4) Pelaksanaan verifikasi hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang tidak memperhatikan output maka atasan langsung akan diberikan sanksi berupa tidak dibayarkan TPP bulan berikut dan TPP yang bersangkutan dikembalikan ke kas daerah.

BAB X  
MEKANISME PENETAPAN TPP ASN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Dalam hal belum adanya Undang-Undang tentang Tambahan Penghasilan Untuk Tahun 2020, Kepala Daerah dapat memberikan TPP ASN setelah mendapatkan persetujuan Menteri.
- (3) Menteri memberikan persetujuan kepada pemerintah daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Keuangan.
- (4) Dalam mengajukan permohonan persetujuan pemberian TPP ASN dimaksud, Tim pelaksanaan TPP ASN pada Pemerintah Daerah Kabupaten menyampaikan draft Peraturan Kepala Daerah mengenai TPP kepada Tim Fasilitasi Pusat untuk selanjutnya dilakukan pembahasan dengan Tim Fasilitasi Pusat.

BAB XII  
PEMOTONGAN TPP

Paragraf 1  
Pemotongan TPP Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 18

Pemotongan TPP Berdasarkan Prestasi Kerja, dilihat sesuai dengan Target capaian SKP:

- (1) Pemotongan TPP berdasarkan pencapaian target SKP dilakukan apabila target kinerja bulanan tidak tercapai.
- (2) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan besaran presentase kinerja bulanan yang tidak tercapai pada bulan berkenaan pada sistem aplikasi kinerja.
- (3) Pemotongan TPP dari unsur SKP dihitung secara akumulatif dalam waktu 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Pemotongan tidak dibenarkan dilakukan diluar sistem aplikasi e-kinerja.
- (5) Pengecualian pemotongan TPP apabila e-kinerja belum berjalan.
- (6) Ada penilaian khusus dari pimpinan.

Paragraf 2  
Pemotongan TPP Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 19

(1) Pemotongan TPP berdasarkan Beban Kerja dilakukan sesuai dengan presensi yakni:

a. Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP:

1) Sebesar 4,544% (empat koma lima empat empat persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;

2) Besaran 4,544% (empat koma lima empat empat persen) sebagaimana angka 1), diperoleh akumulasi 100% (seratus persen) untuk 1 (satu) bulan dibagi 22 (dua puluh dua) hari efektif.

b. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PRESENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d. 30 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. 60 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. 90 menit	1,25%
TL 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

c. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PRESENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. 30 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. 60 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. 90	1,25%
PSW 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

(2) Potongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dijumlahkan dalam bentuk presentase lalu dikalikan dengan jumlah hari efektif kerja selama 1 (satu) bulan berkenaan, lalu diupload pada aplikasi sistem kinerja untuk mendapatkan unsur disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).



(3) Perhitungan jumlah presentasi kehadiran dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Nilai Absensi	= (nilai absensi efektif) - (nilai absensi tidak hadir) - (nilai absensi keterlambatan (TL)) - (nilai absensi pulang sebelum waktunya (PSW)).
Nilai absensi efektif	= 4,544% x 22 hari efektif kerja x 100
Nilai absensi tidak hadir	= 4,544% x jumlah alpa x 100
Nilai absensi Terlambatan (TL)	= Total TL1 + Total TL2 + Total TL3 + Total TL4
Total TL1	= 0,5% x jumlah keterlambatan x 100
Total TL2	= 1% x jumlah keterlambatan x 100
Total TL3	= 1,25% x jumlah keterlambatan x 100
Total TL4	= 1,5% x jumlah keterlambatan x 100
Nilai absensi pulang sebelum waktunya (PSW)	= Total PSW1 + Total PSW2 + Total PSW3 + Total PSW4
Total PSW1	= 0,5% x jumlah pulang sebelum waktunya x 100
Total PSW2	= 1% x jumlah pulang sebelum waktunya x 100
Total PSW3	= 1,25% x jumlah pulang sebelum waktunya x 100
Total PSW4	= 1,5% x jumlah pulang sebelum waktunya x 100

### Paragraf 3 Pemberian Izin

#### Pasal 20

- (1) Pemberian izin mengikuti apel atau upacara atau olahraga karena urusan pribadi paling banyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberian izin tidak melakukan presensi karena urusan pribadi paling banyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Meninggalkan tugas pada saat jam kerja karena urusan pribadi diketahui oleh atasan langsung paling banyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dibuktikan dengan surat keterangan pemberian izin dari pimpinan OPD.

- (5) Pegawai yang tidak menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sebagai ketidakhadiran tanpa keterangan.

### BAB XIII TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN TPP

#### Pasal 21

- (1) TPP dibayarkan sejak Januari sampai dengan Desember pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Permintaan pembayaran TPP diajukan pada bulan berikutnya paling lambat tanggal 10 dan untuk bulan Desember diajukan pada minggu pertama bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Tata cara permintaan pembayaran uang TPP ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Pejabat penanggung jawab mengajukan surat permintaan membayar langsung (SPM-LS) melalui bendahara pengeluaran dari masing-masing OPD sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan melampirkan:
    1. Daftar rekapitulasi presensi pegawai;
    2. Daftar pembayaran rekapitulasi absensi yang dicetak melalui aplikasi sistem kinerja; dan
    3. Daftar pembayaran rekapitulasi kinerja yang dicetak melalui aplikasi sistem kinerja.
  - b. Permintaan pembayaran uang TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sebagai berikut:
    1. Untuk lingkup Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
    2. Untuk Sekretariat DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;
    3. Untuk Inspektorat dan Rumah Sakit Umum Daerah ditandatangani oleh Inspektur dan Direktur; dan
    4. Untuk Badan/Dinas/kantor ditandatangani oleh Kepala Badan/Dinas/kantor.
- (4) Kepala OPD atau unit kerja menandatangani/paraf laporan rekapitulasi TPP pada OPD atau unit kerja yang dipimpinnya.
- (5) Penyampaian rekapitulasi presensi dan rekapitulasi TPP untuk bulan Desember disampaikan paling lama hari ke 6 (enam) bulan berikutnya.
- (6) Pengajuan Pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV  
PEMBIAYAAN

Pasal 22

TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

BAB XV  
PERSETUJUAN TPP ASN

Pasal 23

- (1) Berdasarkan analisa dan validasi yang dilakukan Tim Fasilitasi Pusat, bagi penetapan pemberian tambahan penghasilan pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan diberikan persetujuan Menteri.
- (2) Berdasarkan analisa dan validasi yang dilakukan Tim Fasilitasi Pusat, bagi penetapan pemberian tambahan penghasilan pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang tidak memenuhi persyaratan tidak diberikan persetujuan Menteri.
- (3) Dalam menetapkan persetujuan kepada Pemerintah Daerah, Menteri memperoleh pertimbangan dari Menteri Keuangan.

BAB XVI  
KELALAIAN

Pasal 24

- (1) Dalam hal pekerjaan ASN yang telah diberi tanggungjawab oleh atasan tidak dilaksanakan dan/atau tidak tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan dalam program kegiatan OPD tidak tuntas dan gagal termasuk didalamnya pencapaian output dan outcome, ASN termasuk para pejabat yang bersangkutan wajib mengembalikan anggaran yang telah digunakan, selanjutnya pengembalian anggaran tersebut disetor ke kas daerah.
- (2) Akibat kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik sengaja maupun tidak sengaja, ASN dianggap mengundurkan diri dari jabatan sekaligus mengganti semua kerugian daerah atau masyarakat.

- (3) Dalam hal ganti rugi keuangan dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), inspektorat dalam hal ini Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Keuangan dan Barang Daerah melaksanakan pemeriksaan dan audit sebagai berikut:
- a. Mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis dan mengevaluasi kasus TP-TGR yang diterima;
  - b. Memproses dan Melaksanakan eksekusi TP-TGR;
  - c. Memberikan pendapat, saran dan pertimbangan Kepada Kepala Daerah pada setiap kasus yang menyangkut TP-TGR termasuk pembebanan, banding, pencatatan, pembebasan, penghapusan, hukuman disiplin, penyerahan melalui Badan Peradilan;
  - d. Penyelesaian Kerugian Daerah apabila terjadi hambatan dan penagihan melalui Instansi terkait;
  - e. Melaporkan secara periodik kepada Kepala Daerah dan Menteri Dalam Negeri CQ. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.

## BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 25

- (1) Pembayaran TPP Pegawai ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja sesuai dengan aplikasi e-kinerja.
- (2) Pembayaran TPP Pegawai ASN bagi CPNS atau CPPPK dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS atau CPPPK.
- (3) Pembayaran TPP Pegawai ASN CPNS bagi CPNS atau CPPPK dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (4) Pembayaran TPP pegawai ASN bagi CPNS atau CPPPK formasi jabatan pelaksana dibayarkan sesuai Keputusan Bupati.
- (5) Pembayaran TPP bagi CPNS atau CPPPK formasi jabatan fungsional dibayarkan sesuai Keputusan Bupati.
- (6) Setiap pegawai ASN yang tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP Pegawai ASN sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (7) Setiap ASN wajib mengikuti dan taat pada sumpah jabatan serta mengikuti azas kepatutan dan azas hukum.

- (8) Ketentuan pada ayat (8), merupakan hak dekresi pimpinan unit/OPD atau PPK untuk memberikan dan putusannya tidak bisa di ganggu gugat.
- (9) Dalam hal Pegawai ASN tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP Pegawai ASN dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (10) Plt. atau Plh. diberikan TPP Pegawai ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (11) Ketentuan mengenai TPP Pegawai ASN tambahan, yaitu:
  - a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP Pegawai ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya.
  - b. Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain menerima TPP Pegawai ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
  - c. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP Pegawai ASN pada Jabatan TPP ASN Pegawai yang tertinggi; dan
  - d. TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh.
  - e. TPP ASN tambahan bagi pegawai yang ditugaskan sebagai Tim Cipta Lapangan Kerja dibayar dihitung sejak dikeluarkan surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh Ketua Tim Cipta Lapangan Kerja.
  - f. Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada huruf e melekat pada OPD sesuai dengan tugas dan fungsi Divisi Cipta Lapangan Kerja.
- (12) Besaran TPP ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan  
pada tanggal 7 Januari 2022  
BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan  
pada tanggal 10 Januari 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD UMAR ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022 NOMOR 10

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI  
 NOMOR 10 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN  
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL  
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

BESARAN TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA
1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI	SEKRETARIAT DAERAH	15	100%
2	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM	SEKRETARIAT DAERAH	14	25%
3	ASISTEN II BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEHUMASAN	SEKRETARIAT DAERAH	14	25%
4	ASISTEN III BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH	14	25%
5	STAF AHLI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEMASYARAKATAN	SEKRETARIAT DAERAH	14	25%
6	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK	SEKRETARIAT DAERAH	14	25%
7	STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN, EKONOMI DAN KEUANGAN	SEKRETARIAT DAERAH	14	25%
8	SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PULAU MOROTAI	SEKRETARIAT DPRD	14	25%
9	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	14	25%
10	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	14	25%
11	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	14	25%
12	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	14	25%
13	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14	25%
14	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	14	25%
15	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	14	25%
16	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	14	25%
17	KEPALA DINAS PARIWISATA	DINAS PARIWISATA	14	25%
18	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	14	25%
19	KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	14	25%
20	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	14	25%
21	KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARAGA	14	25%

22	KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	14	25%
23	KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	14	25%
24	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	14	25%
25	KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	14	25%
26	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	14	25%
27	INSPEKTUR PULAU MOROTAI	INSPEKTORAT	14	45%
28	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	14	25%
29	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	14	25%
30	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	14	25%
31	KEPALA SATUAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	14	25%
32	KEPALA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	14	25%
33	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	14	25%
34	DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	13	25%
35	KEPALA KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	13	19%
36	KEPALA KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	13	19%
37	KEPALA KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	13	19%
38	KEPALA KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	13	19%
39	KEPALA KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	13	19%
40	KEPALA KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	13	19%
41	KEPALA TATA USAHA	ASISTEN II BIDANG ADMINISTRASI DAN KEHUMASAN	12	25%
42	SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	12	25%
43	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	12	25%
44	SEKERTARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	12	25%
45	SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	12	25%
46	SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	12	25%
47	SEKRETARIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAEAH	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	12	25%
48	SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	12	25%
49	SEKRETARIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	12	25%



50	SEKRETARIS DINAS	DINAS PARIWISATA	12	25%
51	SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	12	25%
52	SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	12	25%
53	SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	12	25%
54	SEKRETARIS DINAS DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	12	25%
55	SEKRETARIS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	12	25%
56	SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	12	25%
57	SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	12	25%
58	SEKRETARIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	12	25%
59	SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	12	25%
60	SEKRETARIS INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	12	32%
61	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	12	25%
62	SEKRETARIS DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	12	25%
63	SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	12	25%
64	SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	12	25%
65	DOKTER GIGI MADYA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	12	25%
66	SEKRETARIS DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	12	25%
67	DOKTER MADYA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	12	25%
68	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	SEKRETARIAT DAERAH	11	30%
69	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM	SEKRETARIAT DAERAH	11	30%
70	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN ORGANISASI	SEKRETARIAT DAERAH	11	30%
71	KEPALA BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN	SEKRETARIAT DAERAH	11	30%
72	KEPALA BAGIAN KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN HUMAS	SEKRETARIAT DAERAH	11	30%
73	KEPALA BAGIAN PROTOKOLER	SEKRETARIAT DAERAH	11	30%
74	KEPALA BAGIAN PENGELOLA PERBATASAN	SEKRETARIAT DAERAH	11	30%
75	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN DAN PEREKONOMIAN	SEKRETARIAT DAERAH	11	30%
76	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	SEKRETARIAT DPRD	11	30%
77	KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN	SEKRETARIAT DPRD	11	30%

78	KEPALA BAGIAN UMUM DPRD	SEKRETARIAT DPRD	11	30%
79	KEPALA BIDANG AKUNTANSI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	11	30%
80	KEPALA BIDANG PENDAPATAN DAN PAJAK BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	11	30%
81	KEPALA BIDANG ASET BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	11	30%
82	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	11	30%
83	KEPALA BIDANG ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	11	30%
84	KEPALA BIDANG PENGADAAN MUTASI, PROMOSI DAN INFORMASI ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	11	30%
85	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN PENILAIAN KINERJA ASN	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	11	30%
86	KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN FISIK PRASARANA	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	11	30%
87	KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL DAN BUDAYA	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	11	30%
88	KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	11	30%
89	KEPALA BIDANG PENELITIAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	11	30%
90	KEPALA BIDANG LALU LINTAS DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	11	30%
91	KEPALA BIDANG ANGKUTAN SARANA DAN PRASARANA DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	11	30%
92	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	11	30%
93	KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	11	30%
94	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	11	30%
95	KEPALA BIDANG PENCATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	11	30%
96	KEPALA BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	11	30%
97	KEPALA BIDANG PENGOLAHAN, LAYANAN DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	11	30%
98	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	11	30%
99	KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	11	30%
100	KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	11	30%

101	KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	11	30%
102	KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	11	30%
103	KEPALA BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN DAN PENYULUHAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	11	30%
104	KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	11	30%
105	KEPALA BIDANG KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	11	30%
106	KEPALA BIDANG PETERNAKAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	11	30%
107	KEPALA BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARWISIATA	DINAS PARIWISATA	11	30%
108	KEPALA BIDANG EKONOMI KREATIF PARIWISATA	DINAS PARIWISATA	11	30%
109	KEPALA BIDANG PEMASARAN PARIWISATA	DINAS PARIWISATA	11	30%
110	KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	11	30%
111	KEPALA BIDANG BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	11	30%
112	KEPALA BIDANG CIPTA KARYA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	11	30%
113	KEPALA BIDANG TATA RUANG DAN BINA KONSTRUKSI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	11	30%
114	KEPALA BIDANG TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	11	30%
115	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	11	30%
116	KEPALA BIDANG PENYIAPAN KAWASAN DAN PENGEMBANGAN PEMUKIMAN TRANSMIGRASI (PKP2TRANS)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	11	30%
117	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	11	30%
118	KEPALA BIDANG PENATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGEMBANGAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DAN LISTRIK	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	11	30%
119	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	11	30%
120	KEPALA BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	11	30%
121	KEPALA BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	11	30%
122	KEPALA BIDANG LAYANAN KEPEMUDAAN	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	11	30%
123	KEPALA BIDANG BANTUAN JAMINAN SOSIAL DAN PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	11	30%
124	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	11	30%

125	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	11	30%
126	KEPALA BIDANG PERUMAHAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	11	30%
127	KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	11	30%
128	KEPALA BIDANG PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	11	30%
129	KEPALA BAGIAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	11	30%
130	KEPALA BIDANG KOPERASI DAN UKM	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	11	30%
131	KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	11	30%
132	KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP DAN PENGAWASAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	11	30%
133	KEPALA BIDANG BUDIDAYA DAN PENGEMBANGAN WILAYAH PESISIR	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	11	30%
134	KEPALA BIDANG PENGUATAN DAYA SAING PRODUK	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	11	30%
135	KEPALA BIDANG KESATUAN BANGSA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11	30%
136	KEPALA BIDANG SOSIAL DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11	30%
137	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I	INSPEKTORAT	11	30%
138	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II	INSPEKTORAT	11	30%
139	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III	INSPEKTORAT	11	30%
140	KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	11	30%
141	KEPALA BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	11	30%
142	KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	11	30%
143	KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	11	30%
144	KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	11	30%
145	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN, PENANAMAN MODAL DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	11	30%
146	KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	11	30%
147	KEPALA BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	11	30%
148	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	11	30%
149	KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	11	30%

150	KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	11	30%
151	KEPALA BIDANG BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT, KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN PENEGAKAN PERDA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	11	30%
152	KEPALA BIDANG KAWASAN PEMBINAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	11	30%
153	KEPALA BIDANG BIDANG PEMADAM KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	11	30%
154	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	11	30%
155	KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIS	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	11	30%
156	KEPALA BIDANG KEPERAWATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	11	30%
157	KEPALA BIDANG PENUNJANG MEDIS	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	11	30%
158	ADMINISTRATOR KESEHATAN MADYA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	11	30%
159	PERAWAT MADYA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	11	30%
160	BIDAN MADYA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	11	30%
161	APOTEKER MADYA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	11	30%
162	SANITARIAN MADYA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	11	30%
163	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT MADYA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	11	30%
164	PENATA ANESTESI MADYA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	11	30%
165	NUTRISIONIS MADYA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	11	30%
166	FISIOTERAPIS MADYA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	11	30%
167	EPIDEMIOLOG KESEHATAN MADYA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	11	30%
168	ENTOMOLOG KESEHATAN MADYA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	11	30%
169	FISIKAWAN MEDIS MADYA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	11	30%
170	PSIKOLOG KLINIS MADYA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	11	30%
171	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	11	30%
172	KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN SDM KESEHATAN	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	11	30%
173	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	11	30%
174	KEPALA BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	11	30%
175	PERAWAT MADYA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	11	30%
176	SEKRETARIS KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	11	30%
177	SEKRETARIS KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	11	30%
178	SEKRETARIS KECAMATAN MOROTAI JAYA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	11	30%
179	SEKRETARIS KECAMATAN MOROTAI SELATAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	11	30%
180	SEKRETARIS KECAMATAN MOROTAI UTARA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	11	30%
181	SEKRETARIS KECAMATAN MOROTAI TIMUR	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	11	30%

182	ANALIS KEBIJAKAN MUDA	SEKRETARIAT DAERAH	10	25%
183	ANALIS KEBIJAKAN MUDA	SEKRETARIAT DAERAH	10	25%
184	PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR MUDA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	10	25%
185	PERENCANA MUDA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	10	25%
186	DOKTER GIGI MUDA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	10	25%
187	DOKTER MUDA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	10	25%
188	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA MUDA	SEKRETARIAT DAERAH	9	20%
189	PRANATA KOMPUTER MUDA	SEKRETARIAT DAERAH	9	20%
190	PENYULUH HUKUM MUDA	SEKRETARIAT DAERAH	9	20%
191	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MUDA	SEKRETARIAT DAERAH	9	20%
192	PRANATA KOMPUTER MUDA	SEKRETARIAT DAERAH	9	20%
193	PRANATA KOMPUTER MUDA	SEKRETARIAT DAERAH	9	20%
194	SURVEYOR PEMETAAN MUDA	SEKRETARIAT DAERAH	9	20%
195	PERENCANA MUDA	SEKRETARIAT DAERAH	9	20%
196	PENYULUH HUKUM MUDA	SEKRETARIAT DAERAH	9	20%
197	ANALIS ANGGARAN MUDA	SEKRETARIAT DPRD	9	20%
198	PERISALAH LEGISLATIF MUDA	SEKRETARIAT DPRD	9	20%
199	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MUDA	SEKRETARIAT DPRD	9	20%
200	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT MUDA	SEKRETARIAT DPRD	9	20%
201	ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	9	20%
202	ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	9	20%
203	AUDITOR KEPEGAWAIAN MUDA	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	9	20%
204	PERENCANA MUDA	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	9	20%
205	PERENCANA MUDA	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	9	20%
206	PUSTAKAWAN MUDA	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	9	20%
207	PERENCANA MUDA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9	20%
208	PERENCANA MUDA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9	20%
209	PERENCANA MUDA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9	20%
210	PERENCANA MUDA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	9	20%
211	PENYULUH PERTANIAN MUDA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	9	20%
212	PENYULUH PERTANIAN MUDA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	9	20%
213	ANALIS KETAHANAN PANGAN MUDA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	9	20%
214	PENYULUH HUKUM MUDA	DINAS PARIWISATA	9	20%
215	ANALIS KEBIJAKAN MUDA	DINAS PARIWISATA	9	20%

216	PRANATA KOMPUTER MUDA	DINAS PARIWISATA	9	20%
217	TEKNIK PENGAIRAN MUDA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9	20%
218	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN MUDA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9	20%
219	PENGAWAS KETENAGAKERJAAN MUDA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	9	20%
220	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP MUDA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	9	20%
221	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN MUDA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	9	20%
222	PELATIH OLAHRAGA MUDA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	9	20%
223	ANALIS KEBIJAKAN MUDA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	9	20%
224	ANALIS KEBIJAKAN MUDA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	9	20%
225	PERENCANA MUDA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9	20%
226	PENYULUH SOSIAL MUDA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9	20%
227	PEKERJA SOSIAL MUDA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9	20%
228	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN MUDA	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	9	20%
229	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN MUDA	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	9	20%
230	PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN MUDA	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	9	20%
231	PENGAWAS KOPERASI MUDA	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	9	20%
232	PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN MUDA	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	9	20%
233	ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	9	20%
234	PENGAWAS PERIKANAN MUDA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	9	20%
235	ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN MUDA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	9	20%
236	AUDITOR MUDA	INSPEKTORAT	9	20%
237	AUDITOR KEPEGAWAIAN MUDA	INSPEKTORAT	9	20%
238	PERENCANA MUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	9	20%
239	ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	9	20%
240	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN MUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	9	20%
241	PENGAWAS SEKOLAH MUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	9	20%
242	GURU MUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	9	20%
243	PAMONG BUDAYA MUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	9	20%
244	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT MUDA	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9	20%

245	AUDITOR MUDA	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9	20%
246	PENILAI PEMERINTAH MUDA	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9	20%
247	PENYULUH HUKUM MUDA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	9	20%
248	POLISI PAMONG PRAJA MUDA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	9	20%
249	PRANATA KOMPUTER MUDA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	9	20%
250	DOKTER GIGI PERTAMA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	9	20%
251	ADMINISTRATOR KESEHATAN MUDA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	9	20%
252	PERAWAT MUDA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	9	20%
253	BIDAN MUDA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	9	20%
254	APOTEKER MUDA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	9	20%
255	SANITARIAN MUDA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	9	20%
256	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT MUDA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	9	20%
257	PENATA ANESTESI MUDA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	9	20%
258	NUTRISIONIS MUDA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	9	20%
259	FISIOTERAPIS MUDA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	9	20%
260	EPIDEMIOLOG KESEHATAN MUDA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	9	20%
261	ENTOMOLOG KESEHATAN MUDA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	9	20%
262	FISIKAWAN MEDIS MUDA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	9	20%
263	PSIKOLOG KLINIS MUDA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	9	20%
264	ADMINISTRATOR KESEHATAN MUDA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	9	20%
265	DOKTER PERTAMA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	9	20%
266	DOKTER GIGI PERTAMA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	9	20%
267	ADMINISTRATOR KESEHATAN MUDA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	9	20%
268	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PERTAMA	SEKRETARIAT DAERAH	8	19%
269	ARSIPARIS PERTAMA	SEKRETARIAT DAERAH	8	19%
270	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERTAMA	SEKRETARIAT DAERAH	8	19%
271	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PERTAMA	SEKRETARIAT DAERAH	8	19%
272	ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA	SEKRETARIAT DAERAH	8	19%
273	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA KEPEGAWAIAN DAN KERUMAHTANGGAAN	SEKRETARIAT DPRD	8	19%
274	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PERTAMA	SEKRETARIAT DPRD	8	19%
275	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEUANGAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8	19%



276	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8	19%
277	KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI LAPORAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8	19%
278	KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI PENERIMAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8	19%
279	KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8	19%
280	KEPALA SUB BIDANG PENAGIHAN DAN PENERIMAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8	19%
281	KEPALA SUB BIDANG PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN ASET BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8	19%
282	KEPALA SUB BIDANG INVENTARIS DAN PENGELOLAAN ASET BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8	19%
283	KEPALA SUB BIDANG PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8	19%
284	KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN UMUM BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8	19%
285	KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8	19%
286	KEPALA SUB BIDANG ANALISIS DAN EVALUASI ANGGARAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8	19%
287	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	8	19%
288	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	8	19%
289	ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	8	19%
290	ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	8	19%
291	AUDITOR KEPEGAWAIAN PERTAMA	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	8	19%
292	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	8	19%
293	PERENCANA PERTAMA	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	8	19%
294	PERENCANA PERTAMA	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	8	19%
295	PERENCANA PERTAMA	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	8	19%

296	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN EVALUASI DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	8	19%
297	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	8	19%
298	KEPALA SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS DAN REKAYASA LALU LINTAS DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	8	19%
299	KEPALA SEKSI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS	DINAS PERHUBUNGAN	8	19%
300	KEPALA SEKSI ANGKUTAN DALAM TRAYEK TIDAK DALAM TRAYEK DAN ANGKUTAN BARANG DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	8	19%
301	KEPALA SEKSI PENGUJIAN SARANA PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PRASARANA DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	8	19%
302	KEPALA SEKSI SEKSI LINGKUNGAN PEMADUAN MODA DAN TEKNOLOGI PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	8	19%
303	KEPALA SEKSI KESELAMATAN DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	8	19%
304	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8	19%
305	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8	19%
306	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, HUMAS DAN KEPEGAWAIAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	8	19%
307	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, TATA USAHA DAN PERLENGKAPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	8	19%
308	ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	8	19%
309	PUSTAKAWAN PERTAMA	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	8	19%
310	KEPALA SUB BAGIAN SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8	19%
311	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8	19%
312	PERENCANA PERTAMA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8	19%
313	PERENCANA PERTAMA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8	19%
314	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPAGAWAIAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	8	19%
315	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PERTAMA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	8	19%
316	PENYULUH PERTANIAN PERTAMA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	8	19%
317	KEPALA SUB BAGIAN UMUM,KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI	DINAS PARIWISATA	8	19%
318	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PERTAMA	DINAS PARIWISATA	8	19%
319	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PERTAMA	DINAS PARIWISATA	8	19%
320	KEPALA SUB BAGIAN SUB BAGIAN PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8	19%

321	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8	19%
322	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PERTAMA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8	19%
323	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	8	19%
324	PERENCANA PERTAMA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	8	19%
325	ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	8	19%
326	PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PERTAMA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	8	19%
327	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8	19%
328	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP PERTAMA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8	19%
329	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN PERTAMA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8	19%
330	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	8	19%
331	PERENCANA MUDA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	8	19%
332	PELATIH OLAHRAGA PERTAMA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	8	19%
333	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	8	19%
334	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PERTAMA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	8	19%
335	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	8	19%
336	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	8	19%
337	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PERTAMA	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	8	19%
338	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN PERTAMA	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	8	19%
339	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	8	19%
340	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	8	19%
341	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PERTAMA	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	8	19%
342	PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERTAMA	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	8	19%
343	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN PENYUSUNAN PROGRAM	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	8	19%
344	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM EVALUASI DAN PELAPORAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8	19%
345	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8	19%
346	KEPALA SUB BIDANG HAM, PEMBAURAN DAN KETAHANAN BANGSA	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8	19%
347	KEPALA SUB BIDANG IDILOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8	19%

348	KEPALA SUB BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8	19%
349	KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN PARTAI POLITIK DAN ORMAS	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8	19%
350	KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM	INSPEKTORAT	8	19%
351	KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	INSPEKTORAT	8	19%
352	AUDITOR PERTAMA	INSPEKTORAT	8	19%
353	AUDITOR KEPEGAWAIAN PERTAMA	INSPEKTORAT	8	19%
354	AUDITOR PERTAMA	INSPEKTORAT	8	19%
355	AUDITOR KEPEGAWAIAN PERTAMA	INSPEKTORAT	8	19%
356	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, PERENCANAAN DAN BMD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	8	19%
357	PERENCANA PERTAMA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	8	19%
358	ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	8	19%
359	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN PERTAMA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	8	19%
360	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PERTAMA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	8	19%
361	PENGAWAS SEKOLAH PERTAMA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	8	19%
362	GURU PERTAMA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	8	19%
363	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	8	19%
364	PRANATA KOMPUTER PERTAMA	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	8	19%
365	STATISTISI PERTAMA	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	8	19%
366	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8	19%
367	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8	19%
368	KEPALA SUB BIDANG PENCEGAHAN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8	19%
369	KEPALA SUB BIDANG KESIAPSIAGAAN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8	19%
370	KEPALA SUB BIDANG KEDARURATAN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8	19%
371	KEPALA SUB BIDANG LOGISTIK DAN PRASARANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8	19%
372	KEPALA SUB BIDANG REHABILITASI	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8	19%
373	KEPALA SUB BIDANG REKONSTUKSI	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8	19%
374	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	8	19%
375	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	8	19%

376	KEPALA SUB BIDANG DETEKSIDINI BIMBINGAN PENYULUHAN DAN PENEGAKAN PERDA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	8	19%
377	KEPALA SUB BIDANG OPERASIONAL PENGENDALIAN KETERTIBAN UMUM DAN HUBUNGAN ANTARLEMBAGA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	8	19%
378	KEPALA SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	8	19%
379	KEPALA SUB BIDANG PELATIHAN DAN MOBILISASI	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	8	19%
380	KEPALA SUB BIDANG PELATIHAN PENCEGAHAN, PEMADAM DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	8	19%
381	KEPALA SUB BIDANG OPERASIONAL SARAN DAN PRASARANA KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	8	19%
382	PENYULUH HUKUM PERTAMA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	8	19%
383	POLISI PAMONG PRAJA PERTAMA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	8	19%
384	POLISI PAMONG PRAJA PENYELIA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	8	19%
385	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	19%
386	KEPALA SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	19%
387	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PROGRAM	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	19%
388	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	19%
389	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	19%
390	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN AKUTANSI	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	19%
391	KEPALA SUB BAGIAN PENGADUAN, PELAPORAN DAN REKAM MEDIK	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	19%
392	KEPALA SEKSI PELAYANAN RAWAT INAP	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	19%
393	KEPALA SEKSI PELAYANAN RAWAT JALAN DAN RUJUKAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	19%
394	KEPALA SEKSI SUMBER DAYA PELAYANAN KEPERAWATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	19%
395	KEPALA SEKSI MUTU PELAYANAN KEPERAWATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	19%
396	KEPALA SEKSI LOGISTIK	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	19%
397	KEPALA SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	19%
398	PERENCANA PERTAMA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	19%
399	PRANATA KOMPUTER PENYELIA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	19%
400	PRANATA KOMPUTER PERTAMA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	19%
401	ADMINISTRATOR KESEHATAN PERTAMA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	19%
402	PERAWAT PENYELIA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	19%
403	PERAWAT PERTAMA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	19%
404	BIDAN PENYELIA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	19%

405	BIDAN PERTAMA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	19%
406	ASISTEN APOTEKER PENYELIA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	19%
407	APOTEKER PERTAMA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	19%
408	PEREKAM MEDIS PENYELIA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	19%
409	RADIOGRAFER PENYELIA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	19%
410	SANITARIAN PENYELIA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	19%
411	SANITARIAN PERTAMA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	19%
412	TEKNISI ELEKTROMEDIS PENYELIA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	19%
413	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT PENYELIA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	19%
414	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT PERTAMA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	19%
415	ASISTEN PENATA ANESTESI PENYELIA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	19%
416	PENATA ANESTESI PERTAMA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	19%
417	NUTRISIONIS PENYELIA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	19%
418	NUTRISIONIS PERTAMA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	19%
419	FISIOTERAPIS PENYELIA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	19%
420	FISIOTERAPIS PERTAMA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	19%
421	EPIDEMIOLOG KESEHATAN PENYELIA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	19%
422	EPIDEMIOLOG KESEHATAN PERTAMA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	19%
423	ENTOMOLOG KESEHATAN PENYELIA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	19%
424	ENTOMOLOG KESEHATAN PERTAMA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	19%
425	OKUPASI TERAPIS PENYELIA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	19%
426	PERAWAT GIGI/ TERAPIS GIGI DAN MULUT PENYELIA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	19%
427	FISIKAWAN MEDIS PERTAMA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	19%
428	PSIKOLOG KLINIS PERTAMA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	19%
429	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	8	19%
430	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, PELAPORAN DAN KEUANGAN	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	8	19%
431	PERENCANA PERTAMA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	8	19%
432	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PERTAMA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	8	19%
433	PERAWAT PENYELIA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	8	19%
434	PERAWAT PERTAMA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	8	19%
435	APOTEKER PERTAMA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	8	19%
436	RADIOGRAFER PENYELIA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	8	19%
437	APOTEKER PERTAMA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	8	19%
438	SANITARIAN PERTAMA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	8	19%

439	PENATA ANESTESI PERTAMA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	8	19%
440	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	8	19%
441	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN DAN PELAPORAN KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	8	19%
442	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	8	19%
443	KEPALA SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	8	19%
444	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	8	19%
445	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	8	19%
446	KEPALA SEKSI PENGAWASAN, PENINDAKAN DAN PENGADUAN KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	8	19%
447	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	8	19%
448	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN DAN PELAPORAN KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	8	19%
449	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	8	19%
450	KEPALA SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	8	19%
451	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	8	19%
452	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	8	19%
453	KEPALA SEKSI PENGAWASAN, PENINDAKAN DAN PENGADUAN KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	8	19%
454	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN MOROTAI JAYA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	8	19%
455	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN DAN PELAPORAN KECAMATAN MOROTAI JAYA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	8	19%
456	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN KECAMATAN MOROTAI JAYA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	8	19%
457	KEPALA SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN KECAMATAN MOROTAI JAYA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	8	19%
458	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN MOROTAI JAYA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	8	19%
459	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM KECAMATAN MOROTAI JAYA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	8	19%
460	KEPALA SEKSI PENGAWASAN, PENINDAKAN DAN PENGADUAN KECAMATAN MOROTAI JAYA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	8	19%
461	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN MOROTAI SELATAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	8	19%
462	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN DAN PELAPORAN KECAMATAN MOROTAI SELATAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	8	19%

463	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN KECAMATAN MOROTAI SELATAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	8	19%
464	KEPALA SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN KECAMATAN MOROTAI SELATAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	8	19%
465	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN MOROTAI SELATAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	8	19%
466	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM KECAMATAN MOROTAI SELATAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	8	19%
467	KEPALA SEKSI PENGAWASAN, PENINDAKAN DAN PENGADUAN KECAMATAN MOROTAI SELATAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	8	19%
468	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN MOROTAI UTARA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	8	19%
469	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN DAN PELAPORAN KECAMATAN MOROTAI UTARA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	8	19%
470	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN KECAMATAN MOROTAI UTARA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	8	19%
471	KEPALA SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN KECAMATAN MOROTAI UTARA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	8	19%
472	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN MOROTAI UTARA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	8	19%
473	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM KECAMATAN MOROTAI UTARA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	8	19%
474	KEPALA SEKSI PENGAWASAN, PENINDAKAN DAN PENGADUAN KECAMATAN MOROTAI UTARA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	8	19%
475	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN MOROTAI TIMUR	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	8	19%
476	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN DAN PELAPORAN KECAMATAN MOROTAI TIMUR	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	8	19%
477	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN KECAMATAN MOROTAI TIMUR	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	8	19%
478	KEPALA SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN KECAMATAN MOROTAI TIMUR	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	8	19%
479	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN MOROTAI TIMUR	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	8	19%
480	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM KECAMATAN MOROTAI TIMUR	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	8	19%
481	KEPALA SEKSI PENGAWASAN, PENINDAKAN DAN PENGADUAN KECAMATAN MOROTAI TIMUR	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	8	19%
482	PENELAAH KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	SEKRETARIAT DAERAH	7	18%
483	PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS	SEKRETARIAT DAERAH	7	18%
484	PENYUSUN RENCANA HASIL TELAAHAN USUL PENGHAPUSAN BARANG	SEKRETARIAT DAERAH	7	18%
485	ANALIS PELINDUNGAN HAK-HAK SIPIL DAN HAK ASASI MANUSIA	SEKRETARIAT DAERAH	7	18%
486	ANALIS INFORMASI	SEKRETARIAT DAERAH	7	18%
487	ANALIS KERJA SAMA	SEKRETARIAT DAERAH	7	18%
488	PENYUSUN BAHAN BANTUAN HUKUM	SEKRETARIAT DAERAH	7	18%
489	ANALIS BATAS WILAYAH	SEKRETARIAT DAERAH	7	18%



490	ANALIS PEMERINTAHAN DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	7	18%
491	ANALIS JABATAN	SEKRETARIAT DAERAH	7	18%
492	ANALIS TATA LAKSANA	SEKRETARIAT DAERAH	7	18%
493	PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	SEKRETARIAT DAERAH	7	18%
494	ANALIS TATA USAHA	SEKRETARIAT DAERAH	7	18%
495	ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN	SEKRETARIAT DAERAH	7	18%
496	PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS	SEKRETARIAT DAERAH	7	18%
497	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	SEKRETARIAT DAERAH	7	18%
498	BENDAHARA	SEKRETARIAT DAERAH	7	40%
499	PENATA LAPORAN KEUANGAN	SEKRETARIAT DAERAH	7	18%
500	PENELAAH KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	SEKRETARIAT DAERAH	7	18%
501	ANALIS PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA	SEKRETARIAT DAERAH	7	18%
502	ANALIS HUMAS	SEKRETARIAT DAERAH	7	18%
503	ANALIS PENERAPAN APLIKASI DAN KONTEN	SEKRETARIAT DAERAH	7	18%
504	ANALIS PERSANDIAN	SEKRETARIAT DAERAH	7	18%
505	ANALIS STATISTIK	SEKRETARIAT DAERAH	7	18%
506	PENATA ACARA	SEKRETARIAT DAERAH	7	18%
507	PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN	SEKRETARIAT DAERAH	7	18%
508	ANALIS PROTOKOL	SEKRETARIAT DAERAH	7	18%
509	ANALIS DATA DAN INFORMASI	SEKRETARIAT DAERAH	7	18%
510	ANALIS TATA USAHA	SEKRETARIAT DAERAH	7	18%
511	PENGAWAS PERBATASAN	SEKRETARIAT DAERAH	7	18%
512	ANALIS INFORMASI PERBATASAN	SEKRETARIAT DAERAH	7	18%
513	ANALIS PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	7	18%
514	ANALIS PENATAAN KAWASAN	SEKRETARIAT DAERAH	7	18%
515	ANALIS PENATAAN KAWASAN	SEKRETARIAT DAERAH	7	18%
516	ANALIS INFRASTRUKTUR	SEKRETARIAT DAERAH	7	18%
517	PENYUSUN PROGRAM PENGAWASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH	7	18%
518	PENYUSUN BAHAN PEMBINAAN KEAGAMAAN	SEKRETARIAT DAERAH	7	18%
519	PENYUSUN PROGRAM PENGAWASAN PEREKONOMIAN	SEKRETARIAT DAERAH	7	18%
520	ANALIS DATA EKONOMI MAKRO	SEKRETARIAT DAERAH	7	18%
521	ANALIS JABATAN	SEKRETARIAT DAERAH	7	18%
522	ANALIS INFORMASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	SEKRETARIAT DAERAH	7	18%
523	ANALIS TATA USAHA	SEKRETARIAT DAERAH	7	18%
524	PENYUSUN PROGRAM PENGAWASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH	7	18%
525	ANALIS TATA USAHA	SEKRETARIAT DAERAH	7	18%
526	ANALIS BATAS WILAYAH	SEKRETARIAT DAERAH	7	18%
527	ANALIS PEMERINTAHAN DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	7	18%
528	PENYUSUN BAHAN BANTUAN HUKUM	SEKRETARIAT DAERAH	7	18%

529	ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN	SEKRETARIAT DAERAH	7	18%
530	ANALIS DATA EKONOMI MAKRO	SEKRETARIAT DAERAH	7	18%
531	PENYUSUN PROGRAM PENGAWASAN PEREKONOMIAN	SEKRETARIAT DAERAH	7	18%
532	ANALIS TATA USAHA	SEKRETARIAT DAERAH	7	18%
533	BENDAHARA	SEKRETARIAT DPRD	7	40%
534	ANALIS LAPORAN KEUANGAN	SEKRETARIAT DPRD	7	18%
535	ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN	SEKRETARIAT DPRD	7	18%
536	ANALIS PRODUK HUKUM	SEKRETARIAT DPRD	7	18%
537	PENYUSUN NASKAH RAPAT PIMPINAN	SEKRETARIAT DPRD	7	18%
538	PENYUSUN RENCANA KEBIJAKAN	SEKRETARIAT DPRD	7	18%
539	PENYUSUN RISALAH	SEKRETARIAT DPRD	7	18%
540	PENYUSUN RANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN	SEKRETARIAT DPRD	7	18%
541	BENDAHARA	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7	40%
542	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7	18%
543	PENATA LAPORAN KEUANGAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7	18%
544	PENATA LAPORAN KEUANGAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7	18%
545	ANALIS SISTEM AKUNTANSI INSTANSI	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7	18%
546	ANALIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7	18%
547	ANALIS PENAGIHAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7	18%
548	ANALIS ASET NEGARA	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7	18%
549	PENYULUH PENGEMBANGAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7	18%
550	ANALIS ASET DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7	18%
551	ANALIS OPTIMALISASI KAS NEGARA	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7	18%
552	ANALIS PERBENDAHARAAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7	18%
553	ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7	18%
554	ANALIS LAYANAN UMUM	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	7	18%
555	BENDAHARA	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	7	40%

556	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	7	18%
557	PENYUSUN RENCANA MUTASI	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	7	18%
558	PENYUSUN LAPORAN HASIL DIKLAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	7	18%
559	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	7	18%
560	BENDAHARA	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	7	40%
561	ANALIS INFRASTRUKTUR	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	7	18%
562	ANALIS PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	7	18%
563	ANALIS PENGEMBANGAN WILAYAH	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	7	18%
564	ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	7	18%
565	ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	7	18%
566	ANALIS KELAUTAN DAN PERIKANAN	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	7	18%
567	ANALIS PANGAN	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	7	18%
568	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	7	18%
569	ANALIS STATISTIK	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	7	18%
570	ANALIS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	7	18%
571	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	DINAS PERHUBUNGAN	7	18%
572	BENDAHARA	DINAS PERHUBUNGAN	7	40%
573	ANALIS LAYANAN UMUM	DINAS PERHUBUNGAN	7	18%
574	ANALIS TEKNIK SURVEI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS	DINAS PERHUBUNGAN	7	18%
575	ANALIS LALU LINTAS	DINAS PERHUBUNGAN	7	18%
576	ANALIS ANGKUTAN DARAT	DINAS PERHUBUNGAN	7	18%

577	PENGAWAS DAN PEMBINA TERMINAL	DINAS PERHUBUNGAN	7	18%
578	PENGAWAS DAN PEMBINA ANGKUTAN	DINAS PERHUBUNGAN	7	18%
579	ANALIS RENCANA INDUK JARINGAN TRANSPORTASI DARAT	DINAS PERHUBUNGAN	7	18%
580	PENGAWAS KESELAMATAN ANGKUTAN	DINAS PERHUBUNGAN	7	18%
581	ANALIS PERENCANAAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7	18%
582	BENDAHARA	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7	40%
583	ANALIS LAPORAN KEUANGAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7	18%
584	PENATA LAPORAN KEUANGAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7	18%
585	PEMERIKSA KEPENDUDUKAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7	18%
586	ANALIS DATA DAN INFORMASI	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7	18%
587	ANALIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7	18%
588	OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (OPERATOR SIAK) MAHIR	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7	18%
589	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	7	18%
590	BENDAHARA	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	7	40%
591	ANALIS TATA USAHA	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	7	18%
592	PENYUSUN RENCANA KEHUMASAN DAN PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	7	18%
593	PENYULUH KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	7	18%
594	PENGAWAS PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	7	18%
595	PENYULUH PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	7	18%
596	BENDAHARA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7	40%
597	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7	18%
598	ANALIS DESA DAN KELURAHAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7	18%
599	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN PENGABDIAN MASYARAKAT	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7	18%
600	ANALIS PROGRAM PEMBERDAYAAN UMAT	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7	18%
601	ANALIS PROGRAM PEMBERDAYAAN UMAT	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7	18%
602	ANALIS INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7	18%
603	ANALIS PENGEMBANGAN EKONOMI PEDESAAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7	18%
604	PENYUSUN RENCANA PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7	18%
605	PENYUSUN INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7	18%
606	ANALIS PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7	18%
607	BENDAHARA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	7	40%

608	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	7	18%
609	PENGAWAS PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN DAN AIR IRIGASI	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	7	18%
610	ANALIS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	7	18%
611	ANALIS KAPASITAS PENYULUH	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	7	18%
612	ANALIS PROGRAM PENYULUHAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	7	18%
613	ANALIS PASAR	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	7	18%
614	PENGAWAS HARGA PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	7	18%
615	ANALIS PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	7	18%
616	ANALIS PAKAN TERNAK	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	7	18%
617	PENGAWAS MUTU BIBIT TERNAK	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	7	18%
618	PENGAWAS PENYAKIT DAN PENGENDALI PENYAKIT HEWAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	7	18%
619	ANALIS LAYANAN UMUM	DINAS PARIWISATA	7	18%
620	ANALIS PERENCANAAN	DINAS PARIWISATA	7	18%
621	BENDAHARA	DINAS PARIWISATA	7	40%
622	PEMERIKSA KEPARIWISATAAN	DINAS PARIWISATA	7	18%
623	ANALIS OBJEK WISATA	DINAS PARIWISATA	7	18%
624	PENYUSUN BAHAN PENGAWASAN PELAKU USAHA	DINAS PARIWISATA	7	18%
625	ANALIS PERENCANAAN	DINAS PARIWISATA	7	18%
626	ANALIS EKONOMI KREATIF	DINAS PARIWISATA	7	18%
627	ANALIS PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR	DINAS PARIWISATA	7	18%
628	ANALIS HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	DINAS PARIWISATA	7	18%
629	PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI	DINAS PARIWISATA	7	18%
630	PENYUSUN RENCANA PROMOSI	DINAS PARIWISATA	7	18%
631	ANALIS PERENCANAAN	DINAS PARIWISATA	7	18%
632	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7	18%
633	ANALIS LAYANAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7	18%

634	BENDAHARA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7	40%
635	PEMERIKSA IRIGASI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7	18%
636	PENGAMAT OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7	18%
637	PENGAWAS JALAN DAN JEMBATAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7	18%
638	PEMERIKSA JALAN DAN JEMBATAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7	18%
639	PENGAWAS BANGUNAN DAN GEDUNG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7	18%
640	PENATA PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7	18%
641	PENATA BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7	18%
642	ANALIS PERENCANAAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7	18%
643	ANALIS TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7	18%
644	PENYUSUN RENCANA TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7	18%
645	PENGAWAS TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7	18%
646	BENDAHARA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	7	40%
647	PENATA LAPORAN KEUANGAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	7	18%
648	ANALIS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	7	18%
649	ANALIS BAHAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	7	18%
650	ANALIS PENATAAN KAWASAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	7	18%
651	ANALIS KAWASAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	7	18%
652	BENDAHARA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7	40%
653	PENELAAH DAMPAK LINGKUNGAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7	18%
654	PEMERIKSA KELISTRIKAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7	18%
655	ANALIS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7	18%
656	PENGAWAS LAPANGAN ANGKUTAN SAMPAH	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7	18%
657	BENDAHARA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7	40%
658	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7	18%
659	ANALIS KEOLAHRAGAAN	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7	18%
660	ANALIS KEOLAHRAGAAN	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7	18%
661	PENYULUH OLAH RAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7	18%
662	PENYULUH KEPEMUDAAN	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7	18%
663	ANALIS KEMITRAAN	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7	18%
664	BENDAHARA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	40%

665	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	18%
666	ANALIS MASALAH SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	18%
667	ANALIS PELAYANAN SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	18%
668	ANALIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	18%
669	ANALIS KOMUNITAS ADAT	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	18%
670	ANALIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	18%
671	ANALIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	18%
672	PENGAWAS PEREMPUAN DAN ANAK	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	18%
673	ANALIS DATA DAN INFORMASI	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7	18%
674	BENDAHARA	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7	40%
675	ANALIS PERENCANAAN WILAYAH PERUMAHAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7	18%
676	ANALIS PERUMAHAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7	18%
677	ANALIS PEMBANGUNAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7	18%
678	ANALIS PENATAAN KAWASAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7	18%
679	ANALIS PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7	18%
680	BENDAHARA	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	7	40%
681	PENATA LAPORAN KEUANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	7	18%
682	ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	7	18%
683	ANALIS PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	7	18%
684	ANALIS PASAR	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	7	18%
685	ANALIS KOPERASI	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	7	18%

686	PENYUSUN RENCANA BIMBINGAN TEKNIS USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	7	18%
687	ANALIS INDUSTRI	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	7	18%
688	ANALIS TEKNOLOGI INDUSTRI	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	7	18%
689	BENDAHARA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	7	40%
690	ANALIS RETRIBUSI DAERAH	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	7	18%
691	PENATA LAPORAN KEUANGAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	7	18%
692	ANALIS KENELAYANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	7	18%
693	PENGELOLA PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	7	18%
694	ANALIS KENELAYANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	7	18%
695	ANALIS BUDIDAYA PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	7	18%
696	ANALIS PEMASARAN DAN KERJASAMA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	7	18%
697	ANALIS MUTU PRODUK	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	7	18%
698	ANALIS LAYANAN UMUM	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7	18%
699	PENATA LAPORAN KEUANGAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7	18%
700	BENDAHARA	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7	40%
701	ANALIS HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7	18%
702	ANALIS WAWASAN KEBANGSAAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7	18%
703	ANALIS KELEMBAGAAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7	18%
704	ANALIS ORGANISASI MASYARAKAT	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7	18%
705	ANALIS PARTAI POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7	18%
706	BENDAHARA	INSPEKTORAT	7	40%
707	PEMERIKSA LAPORAN DAN TRANSAKSI KEUANGAN	INSPEKTORAT	7	18%
708	BENDAHARA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	7	40%
709	PENYUSUN PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NONFORMAL	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	7	18%
710	ANALIS PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NONFORMAL	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	7	18%
711	PERANCANG SISTEM INFORMASI PENILAIAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	7	18%
712	ANALIS INFORMASI PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	7	18%
713	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	7	18%
714	ANALIS INFORMASI KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	7	18%
715	ANALIS LAYANAN UMUM	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7	18%



716	BENDAHARA	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7	40%
717	ANALIS PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7	18%
718	PENGAWAS PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7	18%
719	ANALIS DATA DAN INFORMASI	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7	18%
720	ANALIS PERIZINAN LAYANAN JASA	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7	18%
721	ANALIS PENGADUAN MASYARAKAT	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7	18%
722	ANALIS PENYULUHAN DAN LAYANAN INFORMASI	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7	18%
723	PENATA LAPORAN KEUANGAN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7	18%
724	BENDAHARA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7	40%
725	ANALIS BENCANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7	18%
726	PENELAAH BAHAN KAJIAN BENCANA ALAM	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7	18%
727	ANALIS PENANGGULANGAN KRISIS	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7	18%
728	PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN LOGISTIK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7	18%
729	PENYUSUN RENCANA REHABILITASI	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7	18%
730	ANALIS PERENCANAAN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7	18%
731	BENDAHARA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	7	40%
732	PENATA LAPORAN KEUANGAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	7	18%
733	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	7	18%
734	POLISI PAMONG PRAJA PELAKSANA LANJUTAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	7	18%
735	ANALIS KERJASAMA APARAT PENEGAK HUKUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	7	18%
736	ANALIS DATA DAN INFORMASI	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	7	18%
737	PENYUSUN KERJASAMA PELATIHAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	7	18%

738	ANALIS KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	7	18%
739	BENDAHARA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	7	40%
740	PENATA LAPORAN KEUANGAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	7	18%
741	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	7	18%
742	PERAWAT MAHIR	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	7	18%
743	BIDAN PELAKSANA LANJUTAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	7	18%
744	ASISTEN APOTEKER PELAKSANA LANJUTAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	7	18%
745	PEREKAM MEDIS PELAKSANA LANJUTAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	7	18%
746	RADIOGRAFER PELAKSANA LANJUTAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	7	18%
747	SANITARIAN PELAKSANA LANJUTAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	7	18%
748	TEKNISI ELEKTROMEDIS MAHIR	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	7	18%
749	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT PELAKSANA LANJUTAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	7	18%
750	ASISTEN PENATA ANESTESI MAHIR	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	7	18%
751	NUTRISIONIS PELAKSANA LANJUTAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	7	18%
752	FISIOTERAPIS PELAKSANA LANJUTAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	7	18%
753	EPIDEMIOLOG KESEHATAN PELAKSANA LANJUTAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	7	18%
754	ENTOMOLOG KESEHATAN PELAKSANA LANJUTAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	7	18%
755	OKUPASI TERAPIS PELAKSANA LANJUTAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	7	18%
756	PERAWAT GIGI/ TERAPIS GIGI DAN MULUT MAHIR	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	7	18%
757	PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN LOGISTIK	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	7	18%
758	ANALIS TATA USAHA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	7	18%
759	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	7	18%
760	ANALIS LAPORAN KEUANGAN	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	7	18%
761	BENDAHARA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	7	40%
762	PENGAWAS MONITORING DAN EVALUASI IMUNISASI PUSKESMAS	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	7	18%
763	ANALIS PENYAKIT MENULAR	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	7	18%
764	PERAWAT MAHIR	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	7	18%
765	BIDAN MAHIR	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	7	18%
766	ASISTEN APOTEKER MAHIR	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	7	18%
767	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN MAHIR	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	7	18%
768	ANALIS PEMBAYARAN JAMINAN KESEHATAN	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	7	18%
769	ANALIS PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MEDIS	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	7	18%

770	ANALIS PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	7	18%
771	ANALIS INFORMASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	7	18%
772	ANALIS PEMBAYARAN JAMINAN KESEHATAN	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	7	18%
773	ANALIS GIZI	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	7	18%
774	PENYUSUN MEKANISME OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	7	18%
775	ANALIS KELUARGA BERENCANA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	7	18%
776	ANALIS MEKANISME OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	7	18%
777	PENYUSUN MEKANISME OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	7	18%
778	ANALIS DATA DAN INFORMASI	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	7	18%
779	PENYUSUN MEKANISME OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	7	18%
780	BENDAHARA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	7	40%
781	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	7	18%
782	PENYUSUN RENCANA PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	7	18%
783	ANALIS PEMBANGUNAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	7	18%
784	PENYUSUN RENCANA PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	7	18%
785	ANALIS KESEJAHTERAAN RAKYAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	7	18%
786	PENYUSUN PROGRAM PENGAWASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	7	18%
787	ANALIS LAYANAN UMUM	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	7	18%
788	ANALIS PELAYANAN SOSIAL	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	7	18%
789	ANALIS PENGAWASAN MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	7	18%
790	ANALIS PENINDAKAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	7	18%
791	ANALIS HASIL PENGAWASAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	7	18%
792	BENDAHARA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	7	40%
793	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	7	18%
794	PENYUSUN RENCANA PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	7	18%
795	ANALIS PEMBANGUNAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	7	18%
796	PENYUSUN RENCANA PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	7	18%
797	ANALIS KESEJAHTERAAN RAKYAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	7	18%
798	PENYUSUN PROGRAM PENGAWASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	7	18%
799	ANALIS LAYANAN UMUM	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	7	18%
800	ANALIS PELAYANAN SOSIAL	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	7	18%

801	ANALIS PENGAWASAN MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	7	18%
802	ANALIS PENINDAKAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	7	18%
803	ANALIS HASIL PENGAWASAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	7	18%
804	BENDAHARA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	7	40%
805	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	7	18%
806	PENYUSUN RENCANA PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	7	18%
807	ANALIS PEMBANGUNAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	7	18%
808	PENYUSUN RENCANA PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	7	18%
809	ANALIS KESEJAHTERAAN RAKYAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	7	18%
810	PENYUSUN PROGRAM PENGAWASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	7	18%
811	ANALIS LAYANAN UMUM	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	7	18%
812	ANALIS PELAYANAN SOSIAL	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	7	18%
813	ANALIS PENGAWASAN MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	7	18%
814	ANALIS PENINDAKAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	7	18%
815	ANALIS HASIL PENGAWASAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	7	18%
816	BENDAHARA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	7	40%
817	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	7	18%
818	PENYUSUN RENCANA PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	7	18%
819	ANALIS PEMBANGUNAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	7	18%
820	PENYUSUN RENCANA PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	7	18%
821	ANALIS KESEJAHTERAAN RAKYAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	7	18%
822	PENYUSUN PROGRAM PENGAWASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	7	18%
823	ANALIS LAYANAN UMUM	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	7	18%
824	ANALIS PELAYANAN SOSIAL	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	7	18%
825	ANALIS PENGAWASAN MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	7	18%
826	ANALIS PENINDAKAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	7	18%
827	ANALIS HASIL PENGAWASAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	7	18%
828	BENDAHARA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	7	40%
829	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	7	18%
830	PENYUSUN RENCANA PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	7	18%
831	ANALIS PEMBANGUNAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	7	18%
832	PENYUSUN RENCANA PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	7	18%

833	ANALIS KESEJAHTERAAN RAKYAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	7	18%
834	PENYUSUN PROGRAM PENGAWASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	7	18%
835	ANALIS LAYANAN UMUM	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	7	18%
836	ANALIS PELAYANAN SOSIAL	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	7	18%
837	ANALIS PENGAWASAN MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	7	18%
838	ANALIS PENINDAKAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	7	18%
839	ANALIS HASIL PENGAWASAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	7	18%
840	BENDAHARA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	7	40%
841	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	7	18%
842	PENYUSUN RENCANA PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	7	18%
843	ANALIS PEMBANGUNAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	7	18%
844	PENYUSUN RENCANA PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	7	18%
845	ANALIS KESEJAHTERAAN RAKYAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	7	18%
846	PENYUSUN PROGRAM PENGAWASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	7	18%
847	ANALIS LAYANAN UMUM	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	7	18%
848	ANALIS PELAYANAN SOSIAL	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	7	18%
849	ANALIS PENGAWASAN MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	7	18%
850	ANALIS PENINDAKAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	7	18%
851	ANALIS HASIL PENGAWASAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	7	18%
852	PENGELOLA UNIT LAYANAN PENGADAAN	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM SETDA	6	15%
853	PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM SETDA	6	15%
854	PENGELOLA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM SETDA	6	15%
855	PENGELOLA INFORMASI PRODUK HUKUM	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM SETDA	6	15%
856	PENGELOLA FASILITASI BANTUAN HUKUM	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM SETDA	6	15%
857	PENGELOLA PERTANAHAN	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM SETDA	6	15%
858	PENGELOLA RENCANA PEMERINTAHAN UMUM	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM SETDA	6	15%
859	PENGELOLA DATA TATA ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM SETDA	6	15%
860	PRANATA KEARSIPAN	ASISTEN II BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEHUMASAN SETDA	6	15%
861	PRANATA KEARSIPAN	ASISTEN II BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEHUMASAN SETDA	6	15%

862	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	ASISTEN II BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEHUMASAN SETDA	6	15%
863	PRANATA BARANG DAN JASA	ASISTEN II BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEHUMASAN SETDA	6	15%
864	TEKNISI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA	ASISTEN II BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEHUMASAN SETDA	6	15%
865	PENGOLAH BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI	ASISTEN II BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEHUMASAN SETDA	6	15%
866	PENGELOLA DATA	ASISTEN II BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEHUMASAN SETDA	6	15%
867	PRANATA ACARA	ASISTEN II BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEHUMASAN SETDA	6	15%
868	PETUGAS PROTOKOL	ASISTEN II BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEHUMASAN SETDA	6	15%
869	PENGELOLA DOKUMENTASI	ASISTEN II BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEHUMASAN SETDA	6	15%
870	PENGOLAH DATA PELAYANAN	ASISTEN II BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEHUMASAN SETDA	6	15%
871	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	ASISTEN II BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEHUMASAN SETDA	6	15%
872	PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL	ASISTEN III BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6	15%
873	PENGELOLA KEGIATAN HARI BESAR KEAGAMAAN	ASISTEN III BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6	15%
874	PENGELOLA BANTUAN KEAGAMAAN	ASISTEN III BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6	15%
875	PENGOLAH DATA EKONOMI MAKRO	ASISTEN III BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6	15%
876	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	SEKRETARIAT DPRD	6	15%
877	PENGELOLA DATA ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI	SEKRETARIAT DPRD	6	15%
878	PENGOLAH DATA LAPORAN KEUANGAN	SEKRETARIAT DPRD	6	15%
879	PENGELOLA PERSIDANGAN	SEKRETARIAT DPRD	6	15%
880	PENGELOLA BARANG PERSEDIAAN	SEKRETARIAT DPRD	6	15%
881	PENGELOLA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	SEKRETARIAT DPRD	6	15%
882	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	SEKRETARIAT DPRD	6	15%
883	PRANATA KEARSIPAN	SEKRETARIAT DPRD	6	15%
884	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	SEKRETARIAT DPRD	6	15%
885	PENGELOLA RUMAH TANGGA	SEKRETARIAT DPRD	6	15%
886	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	SEKRETARIAT DPRD	6	15%
887	PRANATA ACARA	SEKRETARIAT DPRD	6	15%
888	PENGELOLA LAYANAN KEHUMASAN	SEKRETARIAT DPRD	6	15%

889	PETUGAS PROTOKOL	SEKRETARIAT DPRD	6	15%
890	PENGELOLA LAPORAN DATA PENERIMAAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6	15%
891	PRANATA KEARSIPAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6	15%
892	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6	15%
893	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6	15%
894	PENGELOLA AKUNTANSI	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6	15%
895	PENGOLAH DATA SISTEM AKUNTANSI	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6	15%
896	PENGELOLA PENDAFTARAN, PENDATAAN PAJAK, DAN RETRIBUSI	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6	15%
897	PENGELOLA RETRIBUSI DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6	15%
898	PENGOLAH DATA PENAGIHAN PAJAK	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6	15%
899	PENGELOLA DATA ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6	15%
900	PENGELOLA LAPORAN DATA PENERIMAAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6	15%
901	PENGELOLA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6	15%
902	PENGELOLA GAJI	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6	15%
903	PENGELOLA PERBENDAHARAAN DAN PELAYANAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6	15%
904	PENGELOLA TRANSFER	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6	15%
905	PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DESA	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6	15%
906	PENGELOLA ANGGARAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6	15%
907	PENGELOLA PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBD	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6	15%
908	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	6	15%
909	PRANATA KEARSIPAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	6	15%
910	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	6	15%
911	PENGELOLA DATABASE	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	6	15%
912	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	6	15%

913	PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	6	15%
914	PENGELOLA DISIPLIN PEGAWAI	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	6	15%
915	PENGELOLA PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	6	15%
916	PENGELOLA PENYELENGGARAAN DIKLAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	6	15%
917	PENGOLAH DATA LAPORAN KEUANGAN	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	6	15%
918	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	6	15%
919	PRANATA KEARSIPAN	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	6	15%
920	PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	6	15%
921	PENGELOLA DATABASE	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	6	15%
922	PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	6	15%
923	PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	6	15%
924	PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	6	15%
925	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	DINAS PERHUBUNGAN	6	15%
926	PENGELOLA LAPORAN DATA PENERIMAAN	DINAS PERHUBUNGAN	6	15%
927	PENGELOLA REALISASI LAPORAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH	DINAS PERHUBUNGAN	6	15%
928	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	DINAS PERHUBUNGAN	6	15%
929	PENGELOLA DATA JARINGAN TRANSPORTASI JALAN	DINAS PERHUBUNGAN	6	15%
930	PENGELOLA SERTIFIKASI KOMPETENSI PENILAI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS	DINAS PERHUBUNGAN	6	15%
931	PENGELOLA PERIZINAN ANGKUTAN JALAN	DINAS PERHUBUNGAN	6	15%
932	PENGELOLA SISTEM INFORMASI SARANA DAN PRASARANA JALAN	DINAS PERHUBUNGAN	6	15%
933	PENGATUR LALU LINTAS JALAN	DINAS PERHUBUNGAN	6	15%
934	PENGELOLA ANGGARAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6	15%
935	PRANATA KEARSIPAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6	15%
936	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6	15%
937	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6	15%



938	PENGELOLA LAPORAN DATA PENERIMAAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6	15%
939	OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (OPERATOR SIAK) TERMAPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6	15%
940	PENGELOLA MUTASI PENDUDUK	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6	15%
941	OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (OPERATOR SIAK) TERMAPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6	15%
942	PENGELOLA DATABASE	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6	15%
943	PENGELOLA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6	15%
944	OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (OPERATOR SIAK) TERMAPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6	15%
945	PENGELOLA PENGADUAN PUBLIK	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6	15%
946	PENGELOLA DATA	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6	15%
947	PENGELOLA DOKUMENTASI	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6	15%
948	PENGELOLA KEUANGAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	6	15%
949	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	6	15%
950	PRANATA KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	6	15%
951	PENGELOLA BAHAN PUSTAKA	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	6	15%
952	PRANATA KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	6	15%
953	PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	6	15%
954	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6	15%
955	PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6	15%
956	PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6	15%
957	PENGELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6	15%
958	PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6	15%
959	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	6	15%
960	PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	6	15%
961	PENYULUH PERTANIAN TERAMPIL	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	6	15%
962	PENGELOLA ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	6	15%
963	PENGELOLA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	6	15%
964	PENGELOLA DATABASE KELEMBAGAAN PETANI	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	6	15%

		MOROTAI		
965	PENGELOLA PERLINDUNGAN TANAMAN DAN PENGELOLAAN HASIL PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	6	15%
966	PENGELOLA BUDIDAYA DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	6	15%
967	PENGELOLA KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	6	15%
968	PENGELOLA KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	6	15%
969	PARAMEDIK VETERINER TERAMPIL	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	6	15%
970	PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	6	15%
971	PENGELOLA BUDIDAYA PENGEMBANGAN TERNAK DAN HEWAN LAINNYA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	6	15%
972	PENGELOLA KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	6	15%
973	PENGELOLA PENDAPATAN	DINAS PARIWISATA	6	15%
974	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	DINAS PARIWISATA	6	15%
975	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	DINAS PARIWISATA	6	15%
976	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	DINAS PARIWISATA	6	15%
977	PENGELOLA OBJEK WISATA	DINAS PARIWISATA	6	15%
978	PENGELOLA USAHA KEPARIWISATAAN	DINAS PARIWISATA	6	15%
979	PENGELOLA DATA EDUKASI	DINAS PARIWISATA	6	15%
980	PENGELOLA PEMASARAN	DINAS PARIWISATA	6	15%
981	PENGELOLA USAHA PEMASARAN DAN PROMOSI WISATA	DINAS PARIWISATA	6	15%
982	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6	15%
983	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6	15%
984	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6	15%
985	PENGELOLA PEMELIHARAAN PERALATAN JALAN DAN JEMBATAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6	15%
986	PENGELOLA PERENCANAAN TEKNIS TATA BANGUNAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6	15%
987	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	6	15%
988	PENGELOLA BAHAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	6	15%
989	PENGOLAH BAHAN PERENCANAAN TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	6	15%
990	PRANATA KETRANSMIGRASIAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	6	15%
991	PENGELOLA KETRANSMIGRASIAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	6	15%

992	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6	15%
993	PRANATA LAPORAN KEUANGAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6	15%
994	PENGELOLA LAPORAN DATA PENERIMAAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6	15%
995	PENGELOLA LINGKUNGAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6	15%
996	PENGELOLA RENCANA ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6	15%
997	PENGELOLA LINGKUNGAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6	15%
998	TEKNISI LISTRIK DAN JARINGAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6	15%
999	PENGELOLA LIMBAH PENGUJIAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6	15%
1000	PENGELOLA LIMBAH	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6	15%
1001	PENGELOLA PENATAAN SAMPAH	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6	15%
1002	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	6	15%
1003	PRANATA LAPORAN KEUANGAN	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	6	15%
1004	PENGELOLA PENDIDIKAN	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	6	15%
1005	PENGELOLA PENATAAN SARANA DAN PRASARANA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	6	15%
1006	PENGELOLA BIMBINGAN TEKNIS STANDARDISASI KOMPETENSI	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	6	15%
1007	PENGELOLA PELAKSANAAN PROGRAM KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	6	15%
1008	PRANATA LAPORAN KEUANGAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6	15%
1009	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6	15%
1010	PENGELOLA PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL DAN LANSIA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6	15%
1011	PENGELOLA DATA BANTUAN SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6	15%
1012	PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6	15%
1013	PENGELOLA DATA KOMUNITAS ADAT	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6	15%
1014	PENGELOLA PENGUATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6	15%
1015	PENGELOLA PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6	15%
1016	PRANATA LAPORAN KEUANGAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6	15%

1017	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6	15%
1018	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6	15%
1019	PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6	15%
1020	PENGELOLA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6	15%
1021	PENGELOLA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6	15%
1022	PENGELOLA TATA RUANG DAN KONSERVASI KAWASAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6	15%
1023	PENGELOLA TATA RUANG DAN KONSERVASI KAWASAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6	15%
1024	PENGELOLA PENATAAN SARANA DAN PRASARANA	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6	15%
1025	PENGELOLA RENCANA PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6	15%
1026	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	6	15%
1027	PENGELOLA LAPORAN DATA PENERIMAAN	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	6	15%
1028	PENGELOLA EKSPOR HASIL USAHA INDUSTRI DAN USAHA PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	6	15%
1029	PENGELOLA PASAR	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	6	15%
1030	PENGELOLA RETRIBUSI DAERAH	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	6	15%
1031	PENGELOLA KEBIJAKAN KELEMBAGAAN KOPERASI	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	6	15%
1032	PENGELOLA PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA KECIL, MIKRO DAN MENENGAH	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	6	15%
1033	PENGELOLA SARANA PERINDUSTRIAN	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	6	15%
1034	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	6	15%
1035	PENGELOLA LAPORAN DATA PENERIMAAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	6	15%
1036	PENGELOLA DATABASE	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	6	15%
1037	PENGELOLA PENGAWASAN PEMBUDIDAYAAN IKAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	6	15%
1038	PENGELOLA PENGAWASAN PENGOLAHAN, PENGANGKUTAN DAN PEMASARAN IKAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	6	15%
1039	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	15%
1040	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	15%
1041	PENGOLAH DATA INTELLJEN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	15%
1042	PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	15%
1043	PENGELOLA BAHAN PENGUATAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	15%
1044	PENGELOLA ORGANISASI POLITIK DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	15%

1045	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	INSPEKTORAT	6	15%
1046	PENGELOLA DATA TEMUAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT	6	15%
1047	PENGELOLA EVALUASI TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN	INSPEKTORAT	6	15%
1048	PRANATA LAPORAN KEUANGAN	INSPEKTORAT	6	15%
1049	PRANATA KEARSIPAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6	15%
1050	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6	15%
1051	PENGOLAH DATA LAPORAN KEUANGAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6	15%
1052	PENGELOLA KALENDER PENDIDIKAN DASAR	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6	15%
1053	PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DASAR	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6	15%
1054	PENGELOLA DATA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6	15%
1055	PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN MENENGAH	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6	15%
1056	PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DASAR	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6	15%
1057	PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6	15%
1058	PENGELOLA DATA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6	15%
1059	PENGELOLA DATABASE PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6	15%
1060	PENGELOLA BANTUAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6	15%
1061	PENGELOLA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6	15%
1062	PENGELOLA RENCANA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6	15%
1063	PRANATA KEARSIPAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6	15%
1064	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6	15%
1065	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6	15%
1066	PRANATA LAPORAN KEUANGAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6	15%
1067	PENGELOLA KERJASAMA PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6	15%
1068	PENGELOLA DATA	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6	15%
1069	PENGELOLA PERIZINAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6	15%
1070	PENGELOLA BAHAN KETATALAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6	15%
1071	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6	15%
1072	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6	15%

1073	PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6	15%
1074	PENGELOLA DATA DAMPAK BENCANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6	15%
1075	PENGOLAH BAHAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6	15%
1076	PENGELOLA DATA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6	15%
1077	PENGELOLA KEBUTUHAN LOGISTIK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6	15%
1078	PENGELOLA REHABILITASI SOSIAL	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6	15%
1079	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	6	15%
1080	PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	6	15%
1081	POLISI PAMONG PRAJA PELAKSANA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	6	15%
1082	PENGELOLA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	6	15%
1083	PENGELOLA KETERTIBAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	6	15%
1084	PENGELOLA DATA KEMANAN DAN KETERTIBAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	6	15%
1085	PENGELOLA DATA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	6	15%
1086	PRANATA PEMADAM KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	6	15%
1087	PENGELOLA PENATAAN SARANA DAN PRASARANA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	6	15%
1088	PRANATA KEARSIPAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	15%
1089	PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	15%
1090	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	15%
1091	PENGELOLA KEBIDANAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	15%
1092	PENGELOLA KEFARMASIAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	15%
1093	PENGELOLA KEPERAWATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	15%
1094	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	15%
1095	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	15%
1096	PENGOLAH DATA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	15%
1097	PENGOLAH DATA PEMBAYARAN JAMINAN KESEHATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	15%
1098	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	15%
1099	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	15%

1100	PENGELOLA DATA LAYANAN INFORMASI DAN EDUKASI PUBLIK	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	15%
1101	PENGELOLA KEPERAWATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	15%
1102	PENGELOLA KEPERAWATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	15%
1103	PERAWAT TERAMPIL	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	15%
1104	BIDAN PELAKSANA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	15%
1105	ASISTEN APOTEKER PELAKSANA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	15%
1106	PEREKAM MEDIS PELAKSANA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	15%
1107	RADIOGRAFER PELAKSANA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	15%
1108	SANITARIAN PELAKSANA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	15%
1109	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	15%
1110	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT PELAKSANA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	15%
1111	ASISTEN PENATA ANESTESI TERAMPIL	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	15%
1112	NUTRISIONIS PELAKSANA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	15%
1113	FISIOTERAPIS PELAKSANA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	15%
1114	EPIDEMIOLOG KESEHATAN PELAKSANA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	15%
1115	ENTOMOLOG KESEHATAN PELAKSANA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	15%
1116	OKUPASI TERAPIS PELAKSANA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	15%
1117	PERAWAT GIGI/ TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	15%
1118	PENGELOLA KEBUTUHAN LOGISTIK	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	15%
1119	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	6	15%
1120	PENGELOLA PENGAMATAN PENYAKIT DAN IMUNISASI	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	6	15%
1121	PENGELOLA PROGRAM IMUNISASI	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	6	15%
1122	PENGELOLA PENYAKIT TIDAK MENULAR	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	6	15%
1123	PENGELOLA PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	6	15%
1124	PENGELOLA PEMBERANTASAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	6	15%
1125	PENGELOLA PENYAKIT TIDAK MENULAR	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	6	15%
1126	PERAWAT TERAMPIL	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	6	15%
1127	BIDAN TERAMPIL	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	6	15%
1128	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	6	15%
1129	FISIOTERAPIS TERAMPIL	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	6	15%
1130	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	6	15%
1131	ASISTEN PENATA ANESTESI TERAMPIL	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	6	15%
1132	PENGELOLA KEBIDANAN	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	6	15%

1133	PENGELOLA DATA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	6	15%
1134	PENGELOLA PELAYANAN KESEHATAN	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	6	15%
1135	PENGOLAH DATA PEMBAYARAN JAMINAN KESEHATAN	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	6	15%
1136	PENGELOLA KEFARMASIAN	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	6	15%
1137	PENGELOLA DATA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	6	15%
1138	PENGELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	6	15%
1139	PENGELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	6	15%
1140	PENGELOLA PROGRAM GIZI	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	6	15%
1141	PENGELOLA BINA KESEJAHTERAAN KELUARGA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	6	15%
1142	PENGELOLA ADVOKASI KONSELING DAN PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	6	15%
1143	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	6	15%
1144	PENGELOLA PERANGKAT KECAMATAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	6	15%
1145	PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	6	15%
1146	PENGELOLA URUSAN AGAMA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	6	15%
1147	PENGELOLA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	6	15%
1148	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	6	15%
1149	PENGELOLA PERANGKAT KECAMATAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	6	15%
1150	PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	6	15%
1151	PENGELOLA URUSAN AGAMA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	6	15%
1152	PENGELOLA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	6	15%
1153	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	6	15%
1154	PENGELOLA PERANGKAT KECAMATAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	6	15%
1155	PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	6	15%
1156	PENGELOLA URUSAN AGAMA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	6	15%
1157	PENGELOLA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	6	15%
1158	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	6	15%
1159	PENGELOLA PERANGKAT KECAMATAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	6	15%
1160	PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	6	15%
1161	PENGELOLA URUSAN AGAMA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	6	15%
1162	PENGELOLA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	6	15%
1163	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	6	15%



1164	PENGELOLA PERANGKAT KECAMATAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	6	15%
1165	PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	6	15%
1166	PENGELOLA URUSAN AGAMA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	6	15%
1167	PENGELOLA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	6	15%
1168	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	6	15%
1169	PENGELOLA PERANGKAT KECAMATAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	6	15%
1170	PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	6	15%
1171	PENGELOLA URUSAN AGAMA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	6	15%
1172	PENGELOLA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	6	15%
1173	PENGADMINISTRASI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	SEKRETARIAT DAERAH	5	15%
1174	PENGADMINISTRASI HUKUM	SEKRETARIAT DAERAH	5	15%
1175	PENGADMINISTRASI BATAS WILAYAH	SEKRETARIAT DAERAH	5	15%
1176	PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	5	15%
1177	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	SEKRETARIAT DAERAH	5	15%
1178	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	SEKRETARIAT DAERAH	5	15%
1179	PENGOLAH INFORMASI DAN KOMUNIKASI	SEKRETARIAT DAERAH	5	15%
1180	PENGADMINISTRASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH	5	15%
1181	PENGADMINISTRASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH	5	15%
1182	PENGADMINISTRASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH	5	15%
1183	PENGADMINISTRASI RISALAH	SEKRETARIAT DPRD	5	15%
1184	PENGADMINISTRASI RAPAT	SEKRETARIAT DPRD	5	15%
1185	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	SEKRETARIAT DPRD	5	15%
1186	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	SEKRETARIAT DPRD	5	15%
1187	PENGADMINISTRASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD	5	15%
1188	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5	15%
1189	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5	15%
1190	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5	15%
1191	PENGADMINISTRASI PAJAK	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5	15%
1192	PENGADMINISTRASI PENERIMAAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5	15%
1193	PEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5	15%

1194	PEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5	15%
1195	PENGADMINISTRASI PENERIMAAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5	15%
1196	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5	15%
1197	PENGADMINISTRASI ANGGARAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5	15%
1198	PENGADMINISTRASI ANGGARAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5	15%
1199	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	5	15%
1200	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	5	15%
1201	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	5	15%
1202	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	5	15%
1203	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5	15%
1204	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5	15%
1205	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5	15%
1206	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5	15%
1207	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5	15%
1208	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5	15%
1209	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	DINAS PERHUBUNGAN	5	15%
1210	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	DINAS PERHUBUNGAN	5	15%
1211	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	DINAS PERHUBUNGAN	5	15%
1212	PENGADMINISTRASI KECELAKAAN LLAJ	DINAS PERHUBUNGAN	5	15%
1213	PEMELIHARA PENERANGAN JALAN	DINAS PERHUBUNGAN	5	15%
1214	PENGADMINISTRASI LLAJ	DINAS PERHUBUNGAN	5	15%
1215	PENGADMINISTRASI ANGGARAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	15%
1216	PENGADMINISTRASI UMUM	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	15%
1217	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	15%
1218	PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	15%

1219	PENGADMINISTRASI DATA PENYAJIAN DAN PUBLIKASI	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	15%
1220	PENGADMINISTRASI AKTA PERKAWINAN, PERCERAIAN, PENGAKUAN, PENGANGKATAN DAN PENGESAHAN ANAK	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	15%
1221	PENGADMINISTRASI AKTA KELAHIRAN DAN KEMATIAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	15%
1222	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	5	15%
1223	PENGADMINISTRASIAN KEPEGAWAIAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	5	15%
1224	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	5	15%
1225	PENGADMINISTRASI PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	5	15%
1226	PENGADMINISTRASI PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	5	15%
1227	PENGADMINISTRASI UMUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	15%
1228	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	15%
1229	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	15%
1230	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	15%
1231	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	15%
1232	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	15%
1233	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	5	15%
1234	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	5	15%
1235	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	5	15%
1236	PEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	5	15%
1237	OPERATOR MESIN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	5	15%
1238	PENYULUH PERTANIAN PEMULA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	5	15%
1239	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	5	15%
1240	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	5	15%
1241	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	DINAS PARIWISATA	5	15%
1242	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	DINAS PARIWISATA	5	15%
1243	PENGADMINISTRASI IZIN USAHA PARIWISATA	DINAS PARIWISATA	5	15%
1244	PENATA PAMERAN	DINAS PARIWISATA	5	15%

1245	PEMANDU WISATA	DINAS PARIWISATA	5	15%
1246	PRANATA TEKNOLOGI INFORMASI KOMPUTER	DINAS PARIWISATA	5	15%
1247	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5	15%
1248	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5	15%
1249	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5	15%
1250	TEKNISI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5	15%
1251	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5	15%
1252	TEKNISI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5	15%
1253	PENILIK JALAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5	15%
1254	PEMELIHARA JALAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5	15%
1255	TEKNISI GEDUNG ATAU BANGUNAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5	15%
1256	TEKNISI RANCANG BANGUN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5	15%
1257	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5	15%
1258	PENGADMINISTRASI PROGRAM DAN KERJASAMA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5	15%
1259	PENGADMINISTRASI KERJASAMA PELATIHAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5	15%
1260	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5	15%
1261	PENGADMINISTRASI BATAS WILAYAH	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5	15%
1262	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5	15%
1263	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5	15%
1264	TEKNISI LISTRIK DAN JARINGAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5	15%
1265	PRAMU TAMAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5	15%
1266	PRANATA TAMAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5	15%
1267	PRANATA PENGAMBILAN SAMPEL	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5	15%
1268	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	5	15%
1269	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	5	15%
1270	PENGAWAS OLAH RAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	5	15%
1271	PENGADMINISTRASI PELATIHAN	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	5	15%
1272	PELATIH ATLET	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	5	15%
1273	PENGADMINISTRASI KERJASAMA PELATIHAN	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	5	15%
1274	PENGADMINISTRASI PROGRAM DAN KERJASAMA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	5	15%
1275	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5	15%

1276	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5	15%
1277	PENGADMINISTRASI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG CACAT	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5	15%
1278	PENGADMINISTRASI REHABILITASI MASALAH SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5	15%
1279	PRANATA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5	15%
1280	PENGADMINISTRASI ANAK TERLANTAR	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5	15%
1281	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5	15%
1282	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5	15%
1283	TEKNISI GEDUNG ATAU BANGUNAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5	15%
1284	JURU SURVEI PERMUKIMAN PERUMAHAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5	15%
1285	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5	15%
1286	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	5	15%
1287	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	5	15%
1288	PENGADMINISTRASI KEBUTUHAN IMPOR	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	5	15%
1289	PENGADMINISTRASI NOTA PERHITUNGAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	5	15%
1290	PENGADMINISTRASI SARANA PENGEMBANGAN USAHA	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	5	15%
1291	PENGADMINISTRASI IZIN USAHA	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	5	15%
1292	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	5	15%
1293	TEKNISI KONSERVASI KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	5	15%
1294	TEKNISI PERIKANAN BUDIDAYA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	5	15%
1295	PENGADMINISTRASI IDENTIFIKASI PULAU- PULAU KECIL	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	5	15%
1296	PENGADMINISTRASI IDENTIFIKASI DAN EVALUASI SENTRA PENGOLAHAN PRODUK	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	5	15%
1297	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5	15%
1298	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5	15%
1299	PRANATA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5	15%

1300	PENGADMINISTRASI PROGRAM DAN KERJASAMA	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5	15%
1301	PENGADMINISTRASI PARTAI	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5	15%
1302	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	INSPEKTORAT	5	15%
1303	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	INSPEKTORAT	5	15%
1304	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	5	15%
1305	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	5	15%
1306	PENGADMINISTRASI KEPENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	5	15%
1307	PENGADMINISTRASI KEPENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	5	15%
1308	PENGADMINISTRASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	5	15%
1309	PENGADMINISTRASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	5	15%
1310	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5	15%
1311	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5	15%
1312	PENGADMINISTRASI AKSES PERMODALAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5	15%
1313	PENGADMINISTRASI IZIN USAHA	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5	15%
1314	PENGADMINISTRASI PENGADUAN PUBLIK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5	15%
1315	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5	15%
1316	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5	15%
1317	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5	15%
1318	PENGADMINISTRASI REHABILITASI MASALAH SOSIAL	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5	15%
1319	TEKNISI RANCANG BANGUN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5	15%
1320	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	5	15%
1321	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	5	15%
1322	POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	5	15%
1323	PRANATA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	5	15%
1324	PENGADMINISTRASI PELATIHAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	5	15%
1325	PENGEMUDI MOBIL PEMADAM KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	5	15%

1326	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	5	15%
1327	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	5	15%
1328	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	5	15%
1329	TEKNISI LABORATORIUM	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	5	15%
1330	TEKNISI LISTRIK, TELEPON, AC, DAN LIFT	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	5	15%
1331	JURU RAWAT JENAZAH	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	5	15%
1332	PENGADMINISTRASI GUDANG FARMASI	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	5	15%
1333	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA PEMULA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	5	15%
1334	PENGADMINISTRASI REKAM MEDIS DAN INFORMASI	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	5	15%
1335	PERAWAT PELAKSANA PEMULA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	5	15%
1336	BIDAN PELAKSANA PEMULA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	5	15%
1337	ASISTEN APOTEKER PELAKSANA PEMULA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	5	15%
1338	PEREKAM MEDIS PEMULA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	5	15%
1339	RADIOGRAFER PEMULA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	5	15%
1340	SANITARIAN PELAKSANA PEMULA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	5	15%
1341	TEKNISI ELEKTROMEDIS PEMULA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	5	15%
1342	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT PEMULA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	5	15%
1343	ASISTEN PENATA ANESTESI PEMULA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	5	15%
1344	NUTRISIONIS PEMULA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	5	15%
1345	FISIOTERAPIS PEMULA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	5	15%
1346	EPIDEMIOLOG KESEHATAN PELAKSANA PEMULA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	5	15%
1347	ENTOMOLOG KESEHATAN PELAKSANA PEMULA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	5	15%
1348	OKUPASI TERAPIS PEMULA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	5	15%
1349	PERAWAT GIGI PELAKSANA PEMULA / TERAPIS GIGI DAN MULUT PELAKSANA PEMULA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	5	15%
1350	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	5	15%
1351	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	5	15%
1352	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	5	15%
1353	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	5	15%
1354	BIDAN PEMULA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	5	15%
1355	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	5	15%
1356	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	5	15%
1357	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	5	15%
1358	PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	5	15%

1359	PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	5	15%
1360	PENGADMINISTRASI PERIZINAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	5	15%
1361	PRANATA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	5	15%
1362	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	5	15%
1363	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	5	15%
1364	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	5	15%
1365	PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	5	15%
1366	PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	5	15%
1367	PENGADMINISTRASI PERIZINAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	5	15%
1368	PRANATA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	5	15%
1369	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	5	15%
1370	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	5	15%
1371	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	5	15%
1372	PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	5	15%
1373	PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	5	15%
1374	PENGADMINISTRASI PERIZINAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	5	15%
1375	PRANATA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	5	15%
1376	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	5	15%
1377	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	5	15%
1378	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	5	15%
1379	PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	5	15%
1380	PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	5	15%
1381	PENGADMINISTRASI PERIZINAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	5	15%
1382	PRANATA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	5	15%
1383	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	5	15%
1384	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	5	15%
1385	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	5	15%
1386	PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	5	15%
1387	PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	5	15%
1388	PENGADMINISTRASI PERIZINAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	5	15%
1389	PRANATA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	5	15%
1390	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	5	15%



1391	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	5	15%
1392	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	5	15%
1393	PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	5	15%
1394	PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	5	15%
1395	PENGADMINISTRASI PERIZINAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	5	15%
1396	PRANATA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	5	15%
1397	PENGEMUDI AMBULAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	4	15%
1398	PENGEMUDI	SEKRETARIAT DPRD	3	15%
1399	PENGEMUDI	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3	15%
1400	PENAGIH RETRIBUSI	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3	15%
1401	PENGEMUDI	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	3	15%
1402	PENGEMUDI	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3	15%
1403	PENAGIH RETRIBUSI	DINAS PERHUBUNGAN	3	15%
1404	PENGEMUDI	DINAS PERHUBUNGAN	3	15%
1405	PENGEMUDI	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3	15%
1406	PENGEMUDI	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	3	15%
1407	PENGEMUDI	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3	15%
1408	PENGEMUDI	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	3	15%
1409	PENGEMUDI	DINAS PARIWISATA	3	15%
1410	PENGEMUDI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3	15%
1411	PENGEMUDI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3	15%
1412	PENGEMUDI	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3	15%
1413	PENGEMUDI	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	3	15%
1414	PENGEMUDI	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3	15%
1415	PENGEMUDI	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3	15%
1416	PENGEMUDI	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	3	15%
1417	PENGEMUDI	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3	15%
1418	PENGEMUDI	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3	15%
1419	PENGEMUDI	INSPEKTORAT	3	15%
1420	PENGEMUDI	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3	15%

1421	PENGEMUDI	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3	15%
1422	PENGEMUDI	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3	15%
1423	PENGEMUDI	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	3	15%
1424	BINATU RUMAH SAKIT	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	3	15%
1425	PENGEMUDI	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	3	15%
1426	PENGEMUDI	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	3	15%
1427	PENGEMUDI	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	3	15%
1428	PENGEMUDI	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	3	15%
1429	PENGEMUDI	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	3	15%
1430	PENGEMUDI	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	3	15%
1431	PRAMU KEBERSIHAN	SEKRETARIAT DPRD	1	15%
1432	PRAMU KEBERSIHAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1	15%
1433	PRAMU KEBERSIHAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	15%
1434	PRAMU KEBERSIHAN	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	15%
1435	PRAMU KEBERSIHAN	DINAS PERHUBUNGAN	1	15%
1436	PRAMU KEBERSIHAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	15%
1437	PRAMU KEBERSIHAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	1	15%
1438	PRAMU KEBERSIHAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	15%
1439	PRAMU KEBERSIHAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	1	15%
1440	PRAMU KEBERSIHAN	DINAS PARIWISATA	1	15%
1441	PRAMU KEBERSIHAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	15%
1442	PRAMU KEBERSIHAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	15%
1443	PRAMU KEBERSIHAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	15%
1444	PRAMU KEBERSIHAN	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	15%
1445	PRAMU KEBERSIHAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	15%
1446	PRAMU KEBERSIHAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1	15%
1447	PRAMU KEBERSIHAN	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	1	15%
1448	PRAMU KEBERSIHAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	15%
1449	PRAMU KEBERSIHAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	15%

1450	PRAMU KEBERSIHAN	INSPEKTORAT	1	15%
1451	PRAMU KEBERSIHAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	15%
1452	PRAMU KEBERSIHAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1	15%
1453	PRAMU KEBERSIHAN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	15%
1454	PRAMU KEBERSIHAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1	15%
1455	PRAMU KEBERSIHAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	1	15%
1456	PRAMU KEBERSIHAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	1	15%
1457	PRAMU KEBERSIHAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	1	15%
1458	PRAMU KEBERSIHAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	1	15%
1459	PRAMU KEBERSIHAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	1	15%
1460	PRAMU KEBERSIHAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	1	15%
1461	PRAMU KEBERSIHAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	1	15%

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI  
 NOMOR 10 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN  
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR  
 SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
 PULAU MOROTAI

**BESARAN TPP BERDASARKAN PRESTASI KERJA**

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA ESELON II	KELAS	PRESTASI KERJA
1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI	SEKRETARIAT DAERAH	15	100%
2	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM	SEKRETARIAT DAERAH	14	23%
3	ASISTEN II BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEHUMASAN	SEKRETARIAT DAERAH	14	23%
4	ASISTEN III BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH	14	23%
5	STAF AHLI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEMASYARAKATAN	SEKRETARIAT DAERAH	14	23%
6	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK	SEKRETARIAT DAERAH	14	23%
7	STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN, EKONOMI DAN KEUANGAN	SEKRETARIAT DAERAH	14	23%
8	SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PULAU MOROTAI	SEKRETARIAT DPRD	14	23%
9	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	14	23%
10	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	14	23%
11	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	14	23%
12	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	14	23%
13	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14	23%
14	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	14	23%
15	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	14	23%
16	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	14	23%
17	KEPALA DINAS PARIWISATA	DINAS PARIWISATA	14	23%
18	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	14	23%
19	KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	14	23%
20	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	14	23%
21	KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARAGA	14	23%
22	KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	14	23%
23	KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	14	23%

24	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGANA KOPERASI DAN UKM	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	14	23%
25	KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	14	23%
26	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	14	23%
27	INSPEKTUR PULAU MOROTAI	INSPEKTORAT	14	23%
28	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	14	23%
29	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	14	23%
30	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	14	23%
31	KEPALA SATUAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	14	23%
32	KEPALA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	14	23%
33	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	14	23%
34	DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	13	15%
35	KEPALA KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	13	15%
36	KEPALA KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	13	15%
37	KEPALA KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	13	15%
38	KEPALA KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	13	15%
39	KEPALA KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	13	15%
40	KEPALA KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	13	15%
41	KEPALA TATA USAHA	ASISTEN II BIDANG ADMINISTRASI DAN KEHUMASAN	12	15%
42	SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	12	15%
43	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	12	15%
44	SEKERTARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	12	15%
45	SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	12	15%
46	SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	12	15%
47	SEKRETARIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAEAH	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	12	15%
48	SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	12	15%
49	SEKRETARIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	12	15%
50	SEKRETARIS DINAS	DINAS PARIWISATA	12	15%
51	SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	12	15%
52	SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	12	15%
53	SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	12	15%

54	SEKRETARIS DINAS DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	12	15%
55	SEKRETARIS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	12	15%
56	SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	12	15%
57	SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN PERDANGANA KOPERASI DAN UKM	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	12	15%
58	SEKRETARIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	12	15%
59	SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	12	15%
60	SEKRETARIS INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	12	15%
61	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	12	15%
62	SEKRETARIS DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	12	15%
63	SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	12	15%
64	SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	12	15%
65	DOKTER GIGI MADYA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	12	15%
66	SEKRETARIS DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	12	15%
67	DOKTER MADYA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	12	15%
68	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	DIBAWAH ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	11	10%
69	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	11	10%
70	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN ORGANISASI	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	11	10%
71	KEPALA BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN	DIBAWAH ASISTEN II BIDANG ADMINISTRASI DAN KEHUMASAN SEKRETARIAT DAERAH	11	10%
72	KEPALA BAGIAN KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN HUMAS	ASISTEN II BIDANG ADMINISTRASI DAN KEHUMASAN SEKRETARIAT DAERAH	11	10%
73	KEPALA BAGIAN PROTOKOLER	ASISTEN II BIDANG ADMINISTRASI DAN KEHUMASAN SEKRETARIAT DAERAH	11	10%
74	KEPALA BAGIAN PENGELOLA PERBATASAN	ASISTEN III BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH	11	10%
75	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN DAN PEREKONOMIAN	DIBAWAH ASISTEN III BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH	11	10%
76	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	SEKRETARIAT DPRD	11	10%
77	KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN	SEKRETARIAT DPRD	11	10%
78	KEPALA BAGIAN UMUM DPRD	SEKRETARIAT DPRD	11	10%
79	KEPALA BIDANG AKUNTANSI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	11	10%

80	KEPALA BIDANG PENDAPATAN DAN PAJAK BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	11	10%
81	KEPALA BIDANG ASET BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	11	10%
82	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	11	10%
83	KEPALA BIDANG ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	11	10%
84	KEPALA BIDANG PENGADAAN MUTASI, PROMOSI DAN INFORMASI ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	11	10%
85	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN PENILAIAN KINERJA ASN	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	11	10%
86	KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN FISIK PRASARANA	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	11	10%
87	KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL DAN BUDAYA	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	11	10%
88	KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	11	10%
89	KEPALA BIDANG PENELITIAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	11	10%
90	KEPALA BIDANG LALU LINTAS DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	11	10%
91	KEPALA BIDANG ANGKUTAN SARANA DAN PRASARANA DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	11	10%
92	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	11	10%
93	KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	11	10%
94	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	11	10%
95	KEPALA BIDANG PENCATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	11	10%
96	KEPALA BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	11	10%
97	KEPALA BIDANG PENGOLAHAN, LAYANAN DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	11	10%
98	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	11	10%
99	KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	11	10%
100	KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	11	10%
101	KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	11	10%

102	KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	11	10%
103	KEPALA BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN DAN PENYULUHAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	11	10%
104	KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	11	10%
105	KEPALA BIDANG KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	11	10%
106	KEPALA BIDANG PETERNAKAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	11	10%
107	KEPALA BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARWISIATA	DINAS PARIWISATA	11	10%
108	KEPALA BIDANG EKONOMI KREATIF PARIWISATA	DINAS PARIWISATA	11	10%
109	KEPALA BIDANG PEMASARAN PARIWISATA	DINAS PARIWISATA	11	10%
110	KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	11	10%
111	KEPALA BIDANG BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	11	10%
112	KEPALA BIDANG CIPTA KARYA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	11	10%
113	KEPALA BIDANG TATA RUANG DAN BINA KONSTRUKSI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	11	10%
114	KEPALA BIDANG TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	11	10%
115	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	11	10%
116	KEPALA BIDANG PENYIAPAN KAWASAN DAN PENGEMBANGAN PEMUKIMAN TRANSMIGRASI (PKP2TRANS)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	11	10%
117	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	11	10%
118	KEPALA BIDANG PENATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGEMBANGAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DAN LISTRIK	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	11	10%
119	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	11	10%
120	KEPALA BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	11	10%
121	KEPALA BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	11	10%
122	KEPALA BIDANG LAYANAN KEPEMUDAAN	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	11	10%
123	KEPALA BIDANG BANTUAN JAMINAN SOSIAL DAN PELAYANAN REHABILITAS SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	11	10%
124	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	11	10%
125	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	11	10%



126	KEPALA BIDANG PERUMAHAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	11	10%
127	KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	11	10%
128	KEPALA BIDANG PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	11	10%
129	KEPALA BAGIAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	11	10%
130	KEPALA BIDANG KOPERASI DAN UKM	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	11	10%
131	KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	11	10%
132	KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP DAN PENGAWASAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	11	10%
133	KEPALA BIDANG BUDIDAYA DAN PENGEMBANGAN WILAYAH PESISIR	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	11	10%
134	KEPALA BIDANG PENGUATAN DAYA SAING PRODUK	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	11	10%
135	KEPALA BIDANG KESATUAN BANGSA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11	10%
136	KEPALA BIDANG SOSIAL DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11	10%
137	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I	INSPEKTORAT	11	10%
138	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II	INSPEKTORAT	11	10%
139	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III	INSPEKTORAT	11	10%
140	KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	11	10%
141	KEPALA BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	11	10%
142	KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	11	10%
143	KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	11	10%
144	KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	11	10%
145	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN, PENANAMAN MODAL DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	11	10%
146	KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	11	10%
147	KEPALA BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	11	10%
148	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	11	10%
149	KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	11	10%
150	KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	11	10%

151	KEPALA BIDANG BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT, KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN PENEGAKAN PERDA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	11	10%
152	KEPALA BIDANG KAWASAN PEMBINAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	11	10%
153	KEPALA BIDANG BIDANG PEMADAM KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	11	10%
154	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	11	10%
155	KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIS	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	11	10%
156	KEPALA BIDANG KEPERAWATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	11	10%
157	KEPALA BIDANG PENUNJANG MEDIS	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	11	10%
158	ADMINISTRATOR KESEHATAN MADYA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	11	10%
159	PERAWAT MADYA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	11	10%
160	BIDAN MADYA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	11	10%
161	APOTEKER MADYA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	11	10%
162	SANITARIAN MADYA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	11	10%
163	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT MADYA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	11	10%
164	PENATA ANESTESI MADYA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	11	10%
165	NUTRISIONIS MADYA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	11	10%
166	FISIOTERAPIS MADYA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	11	10%
167	EPIDEMIOLOG KESEHATAN MADYA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	11	10%
168	ENTOMOLOG KESEHATAN MADYA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	11	10%
169	FISIKAWAN MEDIS MADYA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	11	10%
170	PSIKOLOG KLINIS MADYA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	11	10%
171	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	11	10%
172	KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN SDMK KESEHATAN	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	11	10%
173	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	11	10%
174	KEPALA BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	11	10%
175	PERAWAT MADYA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	11	10%
176	SEKRETARIS KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	11	10%
177	SEKRETARIS KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	11	10%
178	SEKRETARIS KECAMATAN MOROTAI JAYA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	11	10%
179	SEKRETARIS KECAMATAN MOROTAI SELATAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	11	10%
180	SEKRETARIS KECAMATAN MOROTAI UTARA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	11	10%
181	SEKRETARIS KECAMATAN MOROTAI TIMUR	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	11	10%
182	ANALIS KEBIJAKAN MUDA	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM	10	13%
183	ANALIS KEBIJAKAN MUDA	ASISTEN III BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	10	13%
184	PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR MUDA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	10	13%
185	PERENCANA MUDA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	10	13%

186	DOKTER GIGI MUDA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	10	13%
187	DOKTER MUDA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	10	13%
188	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA MUDA	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM	9	12%
189	PRANATA KOMPUTER MUDA	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM	9	12%
190	PENYULUH HUKUM MUDA	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM	9	12%
191	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MUDA	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM	9	12%
192	PRANATA KOMPUTER MUDA	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM	9	12%
193	PRANATA KOMPUTER MUDA	ASISTEN II BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEHUMASAN	9	12%
194	SURVEYOR PEMETAAN MUDA	ASISTEN III BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	9	12%
195	PERENCANA MUDA	ASISTEN III BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	9	12%
196	PENYULUH HUKUM MUDA	ASISTEN III BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	9	12%
197	ANALIS ANGGARAN MUDA	SEKRETARIAT DPRD	9	12%
198	PERISALAH LEGISLATIF MUDA	SEKRETARIAT DPRD	9	12%
199	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MUDA	SEKRETARIAT DPRD	9	12%
200	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT MUDA	SEKRETARIAT DPRD	9	12%
201	ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	9	12%
202	ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	9	12%
203	AUDITOR KEPEGAWAIAN MUDA	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	9	12%
204	PERENCANA MUDA	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	9	12%
205	PERENCANA MUDA	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	9	12%
206	PUSTAKAWAN MUDA	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	9	12%
207	PERENCANA MUDA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9	12%
208	PERENCANA MUDA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9	12%
209	PERENCANA MUDA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9	12%
210	PERENCANA MUDA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	9	12%
211	PENYULUH PERTANIAN MUDA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	9	12%
212	PENYULUH PERTANIAN MUDA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	9	12%
213	ANALIS KETAHANAN PANGAN MUDA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	9	12%

214	PENYULUH HUKUM MUDA	DINAS PARIWISATA	9	12%
215	ANALIS KEBIJAKAN MUDA	DINAS PARIWISATA	9	12%
216	PRANATA KOMPUTER MUDA	DINAS PARIWISATA	9	12%
217	TEKNIK PENGAIRAN MUDA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9	12%
218	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN MUDA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9	12%
219	PENGAWAS KETENAGAKERJAAN MUDA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	9	12%
220	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP MUDA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	9	12%
221	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN MUDA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	9	12%
222	PELATIH OLAHRAGA MUDA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	9	12%
223	ANALIS KEBIJAKAN MUDA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	9	12%
224	ANALIS KEBIJAKAN MUDA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	9	12%
225	PERENCANA MUDA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9	12%
226	PENYULUH SOSIAL MUDA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9	12%
227	PEKERJA SOSIAL MUDA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9	12%
228	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN MUDA	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	9	12%
229	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN MUDA	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	9	12%
230	PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN MUDA	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	9	12%
231	PENGAWAS KOPERASI MUDA	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	9	12%
232	PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN MUDA	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	9	12%
233	ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	9	12%
234	PENGAWAS PERIKANAN MUDA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	9	12%
235	ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN MUDA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	9	12%
236	AUDITOR MUDA	INSPEKTORAT	9	12%
237	AUDITOR KEPEGAWAIAN MUDA	INSPEKTORAT	9	12%
238	PERENCANA MUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	9	12%
239	ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	9	12%
240	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN MUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	9	12%
241	PENGAWAS SEKOLAH MUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	9	12%
242	GURU MUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	9	12%
243	PAMONG BUDAYA MUDA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	9	12%

244	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT MUDA	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9	12%
245	AUDITOR MUDA	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9	12%
246	PENILAI PEMERINTAH MUDA	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9	12%
247	PENYULUH HUKUM MUDA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	9	12%
248	POLISI PAMONG PRAJA MUDA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	9	12%
249	PRANATA KOMPUTER MUDA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	9	12%
250	DOKTER GIGI PERTAMA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	9	12%
251	ADMINISTRATOR KESEHATAN MUDA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	9	12%
252	PERAWAT MUDA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	9	12%
253	BIDAN MUDA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	9	12%
254	APOTEKER MUDA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	9	12%
255	SANITARIAN MUDA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	9	12%
256	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT MUDA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	9	12%
257	PENATA ANESTESI MUDA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	9	12%
258	NUTRISIONIS MUDA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	9	12%
259	FISIOTERAPIS MUDA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	9	12%
260	EPIDEMIOLOG KESEHATAN MUDA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	9	12%
261	ENTOMOLOG KESEHATAN MUDA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	9	12%
262	FISIKAWAN MEDIS MUDA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	9	12%
263	PSIKOLOG KLINIS MUDA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	9	12%
264	ADMINISTRATOR KESEHATAN MUDA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	9	12%
265	DOKTER PERTAMA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	9	12%
266	DOKTER GIGI PERTAMA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	9	12%
267	ADMINISTRATOR KESEHATAN MUDA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	9	12%
268	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PERTAMA	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM	8	20%
269	ARSIPARIS PERTAMA	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM	8	20%
270	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERTAMA	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM	8	20%
271	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PERTAMA	ASISTEN II BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEHUMASAN	8	20%
272	ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA	ASISTEN III BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	20%
273	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA KEPEGAWAIAN DAN KERUMAHTANGGAAN	SEKRETARIAT DPRD	8	20%
274	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PERTAMA	SEKRETARIAT DPRD	8	20%
275	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEUANGAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8	20%

276	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8	20%
277	KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI LAPORAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8	20%
278	KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI PENERIMAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8	20%
279	KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8	20%
280	KEPALA SUB BIDANG PENAGIHAN DAN PENERIMAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8	20%
281	KEPALA SUB BIDANG PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN ASET BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8	20%
282	KEPALA SUB BIDANG INVENTARIS DAN PENGELOLAAN ASET BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8	20%
283	KEPALA SUB BIDANG PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8	20%
284	KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN UMUM BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8	20%
285	KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8	20%
286	KEPALA SUB BIDANG ANALISIS DAN EVALUASI ANGGARAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8	20%
287	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	8	20%
288	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	8	20%
289	ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	8	20%
290	ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	8	20%
291	AUDITOR KEPEGAWAIAN PERTAMA	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	8	20%
292	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	8	20%
293	PERENCANA PERTAMA	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	8	20%

294	PERENCANA PERTAMA	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	8	20%
295	PERENCANA PERTAMA	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	8	20%
296	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN EVALUASI DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	8	20%
297	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	8	20%
298	KEPALA SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS DAN REKAYASA LALU LINTAS DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	8	20%
299	KEPALA SEKSI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS	DINAS PERHUBUNGAN	8	20%
300	KEPALA SEKSI ANGKUTAN DALAM TRAYEK TIDAK DALAM TRAYEK DAN ANGKUTAN BARANG DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	8	20%
301	KEPALA SEKSI PENGUJIAN SARANA PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PRASARANA DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	8	20%
302	KEPALA SEKSI SEKSI LINGKUNGAN PEMADUAN MODA DAN TEKNOLOGI PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	8	20%
303	KEPALA SEKSI KESELAMATAN DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	8	20%
304	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8	20%
305	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8	20%
306	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, HUMAS DAN KEPEGAWAIAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	8	20%
307	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, TATA USAHA DAN PERLENGKAPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	8	20%
308	ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	8	20%
309	PUSTAKAWAN PERTAMA	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	8	20%
310	KEPALA SUB BAGIAN SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8	20%
311	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8	20%
312	PERENCANA PERTAMA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8	20%
313	PERENCANA PERTAMA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8	20%
314	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPAGAWAIAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	8	20%
315	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PERTAMA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	8	20%

316	PENYULUH PERTANIAN PERTAMA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	8	20%
317	KEPALA SUB BAGIAN UMUM,KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI	DINAS PARIWISATA	8	20%
318	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PERTAMA	DINAS PARIWISATA	8	20%
319	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PERTAMA	DINAS PARIWISATA	8	20%
320	KEPALA SUB BAGIAN SUB BAGIAN PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8	20%
321	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8	20%
322	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PERTAMA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8	20%
323	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	8	20%
324	PERENCANA PERTAMA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	8	20%
325	ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	8	20%
326	PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PERTAMA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	8	20%
327	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8	20%
328	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP PERTAMA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8	20%
329	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN PERTAMA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8	20%
330	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	8	20%
331	PERENCANA MUDA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	8	20%
332	PELATIH OLAHRAGA PERTAMA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	8	20%
333	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK	8	20%
334	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PERTAMA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK	8	20%
335	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	8	20%
336	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	8	20%
337	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PERTAMA	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	8	20%
338	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN PERTAMA	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	8	20%
339	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	8	20%
340	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PENYUSUNAN PROGRAN DAN KEUANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	8	20%



341	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PERTAMA	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	8	20%
342	PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERTAMA	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	8	20%
343	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN PENYUSUNAN PROGRAM	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	8	20%
344	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM EVALUASI DAN PELAPORAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8	20%
345	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8	20%
346	KEPALA SUB BIDANG HAM,PEMBAURAN DAN KETAHANAN BANGSA	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8	20%
347	KEPALA SUB BIDANG IDILOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8	20%
348	KEPALA SUB BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8	20%
349	KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN PARTAI POLITIK DAN ORMAS	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8	20%
350	KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM	INSPEKTORAT	8	20%
351	KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	INSPEKTORAT	8	20%
352	AUDITOR PERTAMA	INSPEKTORAT	8	20%
353	AUDITOR KEPEGAWAIAN PERTAMA	INSPEKTORAT	8	20%
354	AUDITOR PERTAMA	INSPEKTORAT	8	20%
355	AUDITOR KEPEGAWAIAN PERTAMA	INSPEKTORAT	8	20%
356	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, PERENCANAAN DAN BMD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	8	20%
357	PERENCANA PERTAMA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	8	20%
358	ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	8	20%
359	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN PERTAMA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	8	20%
360	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PERTAMA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	8	20%
361	PENGAWAS SEKOLAH PERTAMA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	8	20%
362	GURU PERTAMA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	8	20%
363	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	8	20%
364	PRANATA KOMPUTER PERTAMA	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	8	20%
365	STATISTISI PERTAMA	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	8	20%
366	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8	20%
367	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8	20%
368	KEPALA SUB BIDANG PENCEGAHAN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8	20%

369	KEPALA SUB BIDANG KESIAPSIAGAAN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8	20%
370	KEPALA SUB BIDANG KEDARURATAN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8	20%
371	KEPALA SUB BIDANG LOGISTIK DAN PRASARANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8	20%
372	KEPALA SUB BIDANG REHABILITASI	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8	20%
373	KEPALA SUB BIDANG REKONSTRUKSI	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8	20%
374	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	8	20%
375	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	8	20%
376	KEPALA SUB BIDANG DETEKSIDINI BIMBINGAN PENYULUHAN DAN PENEGAKAN PERDA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	8	20%
377	KEPALA SUB BIDANG OPERASIONAL PENGENDALIAN KETERTIBAN UMUM DAN HUBUNGAN ANTARLEMBAGA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	8	20%
378	KEPALA SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	8	20%
379	KEPALA SUB BIDANG PELATIHAN DAN MOBILISASI	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	8	20%
380	KEPALA SUB BIDANG PELATIHAN PENCEGAHAN, PEMADAM DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	8	20%
381	KEPALA SUB BIDANG OPERASIONAL SARAN DAN PRASARANA KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	8	20%
382	PENYULUH HUKUM PERTAMA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	8	20%
383	POLISI PAMONG PRAJA PERTAMA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	8	20%
384	POLISI PAMONG PRAJA PENYELIA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	8	20%
385	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	20%
386	KEPALA SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	20%
387	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PROGRAM	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	20%
388	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	20%
389	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	20%
390	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN AKUTANSI	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	20%
391	KEPALA SUB BAGIAN PENGADUAN, PELAPORAN DAN REKAM MEDIK	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	20%
392	KEPALA SEKSI PELAYANAN RAWAT INAP	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	20%
393	KEPALA SEKSI PELAYANAN RAWAT JALAN DAN RUJUKAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	20%
394	KEPALA SEKSI SUMBER DAYA PELAYANAN KEPERAWATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	20%
395	KEPALA SEKSI MUTU PELAYANAN KEPERAWATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	20%
396	KEPALA SEKSI LOGISTIK	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	20%
397	KEPALA SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	20%
398	PERENCANA PERTAMA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	20%

399	PRANATA KOMPUTER PENYELIA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	20%
400	PRANATA KOMPUTER PERTAMA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	20%
401	ADMINISTRATOR KESEHATAN PERTAMA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	20%
402	PERAWAT PENYELIA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	20%
403	PERAWAT PERTAMA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	20%
404	BIDAN PENYELIA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	20%
405	BIDAN PERTAMA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	20%
406	ASISTEN APOTEKER PENYELIA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	20%
407	APOTEKER PERTAMA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	20%
408	PEREKAM MEDIS PENYELIA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	20%
409	RADIOGRAFER PENYELIA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	20%
410	SANITARIAN PENYELIA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	20%
411	SANITARIAN PERTAMA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	20%
412	TEKNISI ELEKTROMEDIS PENYELIA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	20%
413	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT PENYELIA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	20%
414	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT PERTAMA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	20%
415	ASISTEN PENATA ANESTESI PENYELIA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	20%
416	PENATA ANESTESI PERTAMA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	20%
417	NUTRISIONIS PENYELIA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	20%
418	NUTRISIONIS PERTAMA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	20%
419	FISIOTERAPIS PENYELIA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	20%
420	FISIOTERAPIS PERTAMA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	20%
421	EPIDEMIOLOG KESEHATAN PENYELIA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	20%
422	EPIDEMIOLOG KESEHATAN PERTAMA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	20%
423	ENTOMOLOG KESEHATAN PENYELIA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	20%
424	ENTOMOLOG KESEHATAN PERTAMA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	20%
425	OKUPASI TERAPIS PENYELIA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	20%
426	PERAWAT GIGI/ TERAPIS GIGI DAN MULUT PENYELIA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	20%
427	FISIKAWAN MEDIS PERTAMA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	20%
428	PSIKOLOG KLINIS PERTAMA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	8	20%
429	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	8	20%
430	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, PELAPORAN DAN KEUANGAN	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	8	20%
431	PERENCANA PERTAMA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	8	20%
432	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PERTAMA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	8	20%
433	PERAWAT PENYELIA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	8	20%
434	PERAWAT PERTAMA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	8	20%

435	APOTEKER PERTAMA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	8	20%
436	RADIOGRAFER PENYELIA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	8	20%
437	APOTEKER PERTAMA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	8	20%
438	SANITARIAN PERTAMA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	8	20%
439	PENATA ANESTESI PERTAMA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	8	20%
440	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	8	20%
441	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN DAN PELAPORAN KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	8	20%
442	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	8	20%
443	KEPALA SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	8	20%
444	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	8	20%
445	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	8	20%
446	KEPALA SEKSI PENGAWASAN, PENINDAKAN DAN PENGADUAN KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	8	20%
447	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	8	20%
448	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN DAN PELAPORAN KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	8	20%
449	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	8	20%
450	KEPALA SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	8	20%
451	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	8	20%
452	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	8	20%
453	KEPALA SEKSI PENGAWASAN, PENINDAKAN DAN PENGADUAN KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	8	20%
454	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN MOROTAI JAYA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	8	20%
455	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN DAN PELAPORAN KECAMATAN MOROTAI JAYA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	8	20%
456	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN KECAMATAN MOROTAI JAYA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	8	20%
457	KEPALA SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN KECAMATAN MOROTAI JAYA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	8	20%

458	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN MOROTAI JAYA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	8	20%
459	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM KECAMATAN MOROTAI JAYA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	8	20%
460	KEPALA SEKSI PENGAWASAN, PENINDAKAN DAN PENGADUAN KECAMATAN MOROTAI JAYA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	8	20%
461	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN MOROTAI SELATAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	8	20%
462	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN DAN PELAPORAN KECAMATAN MOROTAI SELATAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	8	20%
463	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN KECAMATAN MOROTAI SELATAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	8	20%
464	KEPALA SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN KECAMATAN MOROTAI SELATAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	8	20%
465	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN MOROTAI SELATAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	8	20%
466	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM KECAMATAN MOROTAI SELATAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	8	20%
467	KEPALA SEKSI PENGAWASAN, PENINDAKAN DAN PENGADUAN KECAMATAN MOROTAI SELATAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	8	20%
468	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN MOROTAI UTARA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	8	20%
469	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN DAN PELAPORAN KECAMATAN MOROTAI UTARA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	8	20%
470	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN KECAMATAN MOROTAI UTARA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	8	20%
471	KEPALA SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN KECAMATAN MOROTAI UTARA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	8	20%
472	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN MOROTAI UTARA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	8	20%
473	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM KECAMATAN MOROTAI UTARA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	8	20%
474	KEPALA SEKSI PENGAWASAN, PENINDAKAN DAN PENGADUAN KECAMATAN MOROTAI UTARA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	8	20%
475	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN MOROTAI TIMUR	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	8	20%
476	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN DAN PELAPORAN KECAMATAN MOROTAI TIMUR	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	8	20%
477	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN KECAMATAN MOROTAI TIMUR	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	8	20%
478	KEPALA SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN KECAMATAN MOROTAI TIMUR	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	8	20%
479	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN MOROTAI TIMUR	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	8	20%
480	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM KECAMATAN MOROTAI TIMUR	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	8	20%

481	KEPALA SEKSI PENGAWASAN, PENINDAKAN DAN PENGADUAN KECAMATAN MOROTAI TIMUR	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	8	20%
482	PENELAAH KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM	7	8%
483	PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM	7	8%
484	PENYUSUN RENCANA HASIL TELAAHAN USUL PENGHAPUSAN BARANG	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM	7	8%
485	ANALIS PELINDUNGAN HAK-HAK SIPIL DAN HAK ASASI MANUSIA	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM	7	8%
486	ANALIS INFORMASI	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM	7	8%
487	ANALIS KERJA SAMA	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM	7	8%
488	PENYUSUN BAHAN BANTUAN HUKUM	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM	7	8%
489	ANALIS BATAS WILAYAH	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM	7	8%
490	ANALIS PEMERINTAHAN DAERAH	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM	7	8%
491	ANALIS JABATAN	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM	7	8%
492	ANALIS TATA LAKSANA	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM	7	8%
493	PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	ASISTEN II BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEHUMASAN	7	8%
494	ANALIS TATA USAHA	ASISTEN II BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEHUMASAN	7	8%
495	ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN	ASISTEN II BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEHUMASAN	7	8%
496	PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS	ASISTEN II BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEHUMASAN	7	8%
497	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	ASISTEN II BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEHUMASAN	7	8%
498	BENDAHARA	ASISTEN II BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEHUMASAN	7	8%
499	PENATA LAPORAN KEUANGAN	ASISTEN II BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEHUMASAN	7	8%
500	PENELAAH KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	ASISTEN II BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEHUMASAN	7	8%
501	ANALIS PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA	ASISTEN II BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEHUMASAN	7	8%
502	ANALIS HUMAS	ASISTEN II BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEHUMASAN	7	8%
503	ANALIS PENERAPAN APLIKASI DAN KONTEN	ASISTEN II BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEHUMASAN	7	8%
504	ANALIS PERSANDIAN	ASISTEN II BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEHUMASAN	7	8%
505	ANALIS STATISTIK	ASISTEN II BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEHUMASAN	7	8%

506	PENATA ACARA	ASISTEN II BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEHUMASAN	7	8%
507	PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN	ASISTEN II BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEHUMASAN	7	8%
508	ANALIS PROTOKOL	ASISTEN II BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEHUMASAN	7	8%
509	ANALIS DATA DAN INFORMASI	ASISTEN II BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEHUMASAN	7	8%
510	ANALIS TATA USAHA	ASISTEN II BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEHUMASAN	7	8%
511	PENGAWAS PERBATASAN	ASISTEN III BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	7	8%
512	ANALIS INFORMASI PERBATASAN	ASISTEN III BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	7	8%
513	ANALIS PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH	ASISTEN III BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	7	8%
514	ANALIS PENATAAN KAWASAN	ASISTEN III BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	7	8%
515	ANALIS PENATAAN KAWASAN	ASISTEN III BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	7	8%
516	ANALIS INFRASTRUKTUR	ASISTEN III BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	7	8%
517	PENYUSUN PROGRAM PENGAWASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	ASISTEN III BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	7	8%
518	PENYUSUN BAHAN PEMBINAAN KEAGAMAAN	ASISTEN III BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	7	8%
519	PENYUSUN PROGRAM PENGAWASAN PEREKONOMIAN	ASISTEN III BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	7	8%
520	ANALIS DATA EKONOMI MAKRO	ASISTEN III BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	7	8%
521	ANALIS JABATAN	STAF AHLI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEMASYARAKATAN	7	8%
522	ANALIS INFORMASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	STAF AHLI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEMASYARAKATAN	7	8%
523	ANALIS TATA USAHA	STAF AHLI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEMASYARAKATAN	7	8%
524	PENYUSUN PROGRAM PENGAWASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	STAF AHLI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEMASYARAKATAN	7	8%
525	ANALIS TATA USAHA	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK	7	8%
526	ANALIS BATAS WILAYAH	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK	7	8%

527	ANALIS PEMERINTAHAN DAERAH	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK	7	8%
528	PENYUSUN BAHAN BANTUAN HUKUM	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK	7	8%
529	ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN	STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN, EKONOMI DAN KEUANGAN	7	8%
530	ANALIS DATA EKONOMI MAKRO	STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN, EKONOMI DAN KEUANGAN	7	8%
531	PENYUSUN PROGRAM PENGAWASAN PEREKONOMIAN	STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN, EKONOMI DAN KEUANGAN	7	8%
532	ANALIS TATA USAHA	STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN, EKONOMI DAN KEUANGAN	7	8%
533	BENDAHARA	SEKRETARIAT DPRD	7	8%
534	ANALIS LAPORAN KEUANGAN	SEKRETARIAT DPRD	7	8%
535	ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN	SEKRETARIAT DPRD	7	8%
536	ANALIS PRODUK HUKUM	SEKRETARIAT DPRD	7	8%
537	PENYUSUN NASKAH RAPAT PIMPINAN	SEKRETARIAT DPRD	7	8%
538	PENYUSUN RENCANA KEBIJAKAN	SEKRETARIAT DPRD	7	8%
539	PENYUSUN RISALAH	SEKRETARIAT DPRD	7	8%
540	PENYUSUN RANCANGAN PERUNDANG- UNDANGAN	SEKRETARIAT DPRD	7	8%
541	BENDAHARA	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7	8%
542	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7	8%
543	PENATA LAPORAN KEUANGAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7	8%
544	PENATA LAPORAN KEUANGAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7	8%
545	ANALIS SISTEM AKUNTANSI INSTANSI	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7	8%
546	ANALIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7	8%
547	ANALIS PENAGIHAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7	8%
548	ANALIS ASET NEGARA	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7	8%
549	PENYULUH PENGEMBANGAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7	8%
550	ANALIS ASET DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7	8%
551	ANALIS OPTIMALISASI KAS NEGARA	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7	8%
552	ANALIS PERBENDAHARAAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7	8%
553	ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7	8%
554	ANALIS LAYANAN UMUM	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	7	8%
555	BENDAHARA	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	7	8%
556	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	7	8%
557	PENYUSUN RENCANA MUTASI	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	7	8%



558	PENYUSUN LAPORAN HASIL DIKLAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	7	8%
559	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	7	8%
560	BENDAHARA	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	7	8%
561	ANALIS INFRASTRUKTUR	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	7	8%
562	ANALIS PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	7	8%
563	ANALIS PENGEMBANGAN WILAYAH	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	7	8%
564	ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	7	8%
565	ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	7	8%
566	ANALIS KELAUTAN DAN PERIKANAN	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	7	8%
567	ANALIS PANGAN	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	7	8%
568	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	7	8%
569	ANALIS STATISTIK	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	7	8%
570	ANALIS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	7	8%
571	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	DINAS PERHUBUNGAN	7	8%
572	BENDAHARA	DINAS PERHUBUNGAN	7	8%
573	ANALIS LAYANAN UMUM	DINAS PERHUBUNGAN	7	8%
574	ANALIS TEKNIK SURVEI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS	DINAS PERHUBUNGAN	7	8%
575	ANALIS LALU LINTAS	DINAS PERHUBUNGAN	7	8%
576	ANALIS ANGKUTAN DARAT	DINAS PERHUBUNGAN	7	8%
577	PENGAWAS DAN PEMBINA TERMINAL	DINAS PERHUBUNGAN	7	8%
578	PENGAWAS DAN PEMBINA ANGKUTAN	DINAS PERHUBUNGAN	7	8%
579	ANALIS RENCANA INDUK JARINGAN TRANSPORTASI DARAT	DINAS PERHUBUNGAN	7	8%

580	PENGAWAS KESELAMATAN ANGKUTAN	DINAS PERHUBUNGAN	7	8%
581	ANALIS PERENCANAAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7	8%
582	BENDAHARA	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7	8%
583	ANALIS LAPORAN KEUANGAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7	8%
584	PENATA LAPORAN KEUANGAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7	8%
585	PEMERIKSA KEPENDUDUKAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7	8%
586	ANALIS DATA DAN INFORMASI	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7	8%
587	ANALIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7	8%
588	OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (OPERATOR SIAK) MAHIR	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7	8%
589	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	7	8%
590	BENDAHARA	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	7	8%
591	ANALIS TATA USAHA	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	7	8%
592	PENYUSUN RENCANA KEHUMASAN DAN PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	7	8%
593	PENYULUH KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	7	8%
594	PENGAWAS PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	7	8%
595	PENYULUH PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	7	8%
596	BENDAHARA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7	8%
597	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7	8%
598	ANALIS DESA DAN KELURAHAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7	8%
599	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN PENGABDIAN MASYARAKAT	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7	8%
600	ANALIS PROGRAM PEMBERDAYAAN UMAT	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7	8%
601	ANALIS PROGRAM PEMBERDAYAAN UMAT	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7	8%
602	ANALIS INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7	8%
603	ANALIS PENGEMBANGAN EKONOMI PEDESAAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7	8%
604	PENYUSUN RENCANA PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7	8%
605	PENYUSUN INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7	8%
606	ANALIS PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7	8%
607	BENDAHARA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	7	8%
608	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	7	8%

609	PENGAWAS PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN DAN AIR IRIGASI	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	7	8%
610	ANALIS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	7	8%
611	ANALIS KAPASITAS PENYULUH	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	7	8%
612	ANALIS PROGRAM PENYULUHAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	7	8%
613	ANALIS PASAR	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	7	8%
614	PENGAWAS HARGA PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	7	8%
615	ANALIS PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	7	8%
616	ANALIS PAKAN TERNAK	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	7	8%
617	PENGAWAS MUTU BIBIT TERNAK	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	7	8%
618	PENGAWAS PENYAKIT DAN PENGENDALI PENYAKIT HEWAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	7	8%
619	ANALIS LAYANAN UMUM	DINAS PARIWISATA	7	8%
620	ANALIS PERENCANAAN	DINAS PARIWISATA	7	8%
621	BENDAHARA	DINAS PARIWISATA	7	8%
622	PEMERIKSA KEPARIWISATAAN	DINAS PARIWISATA	7	8%
623	ANALIS OBJEK WISATA	DINAS PARIWISATA	7	8%
624	PENYUSUN BAHAN PENGAWASAN PELAKU USAHA	DINAS PARIWISATA	7	8%
625	ANALIS PERENCANAAN	DINAS PARIWISATA	7	8%
626	ANALIS EKONOMI KREATIF	DINAS PARIWISATA	7	8%
627	ANALIS PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR	DINAS PARIWISATA	7	8%
628	ANALIS HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	DINAS PARIWISATA	7	8%
629	PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI	DINAS PARIWISATA	7	8%
630	PENYUSUN RENCANA PROMOSI	DINAS PARIWISATA	7	8%
631	ANALIS PERENCANAAN	DINAS PARIWISATA	7	8%
632	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7	8%
633	ANALIS LAYANAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7	8%
634	BENDAHARA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7	8%
635	PEMERIKSA IRIGASI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7	8%

636	PENGAMAT OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7	8%
637	PENGAWAS JALAN DAN JEMBATAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7	8%
638	PEMERIKSA JALAN DAN JEMBATAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7	8%
639	PENGAWAS BANGUNAN DAN GEDUNG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7	8%
640	PENATA PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7	8%
641	PENATA BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7	8%
642	ANALIS PERENCANAAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7	8%
643	ANALIS TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7	8%
644	PENYUSUN RENCANA TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7	8%
645	PENGAWAS TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7	8%
646	BENDAHARA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	7	8%
647	PENATA LAPORAN KEUANGAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	7	8%
648	ANALIS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	7	8%
649	ANALIS BAHAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	7	8%
650	ANALIS PENATAAN KAWASAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	7	8%
651	ANALIS KAWASAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	7	8%
652	BENDAHARA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7	8%
653	PENELAHAH DAMPAK LINGKUNGAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7	8%
654	PEMERIKSA KELISTRIKAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7	8%
655	ANALIS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7	8%
656	PENGAWAS LAPANGAN ANGKUTAN SAMPAH	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7	8%
657	BENDAHARA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7	8%
658	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7	8%
659	ANALIS KEOLAHRAGAAN	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7	8%
660	ANALIS KEOLAHRAGAAN	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7	8%
661	PENYULUH OLAH RAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7	8%
662	PENYULUH KEPEMUDAAN	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7	8%
663	ANALIS KEMITRAAN	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7	8%
664	BENDAHARA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	8%
665	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	8%

666	ANALIS MASALAH SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	8%
667	ANALIS PELAYANAN SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	8%
668	ANALIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	8%
669	ANALIS KOMUNITAS ADAT	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	8%
670	ANALIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	8%
671	ANALIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	8%
672	PENGAWAS PEREMPUAN DAN ANAK	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	8%
673	ANALIS DATA DAN INFORMASI	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7	8%
674	BENDAHARA	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7	8%
675	ANALIS PERENCANAAN WILAYAH PERUMAHAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7	8%
676	ANALIS PERUMAHAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7	8%
677	ANALIS PEMBANGUNAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7	8%
678	ANALIS PENATAAN KAWASAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7	8%
679	ANALIS PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7	8%
680	BENDAHARA	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	7	8%
681	PENATA LAPORAN KEUANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	7	8%
682	ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	7	8%
683	ANALIS PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	7	8%
684	ANALIS PASAR	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	7	8%
685	ANALIS KOPERASI	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	7	8%
686	PENYUSUN RENCANA BIMBINGAN TEKNIS USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	7	8%
687	ANALIS INDUSTRI	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	7	8%

688	ANALIS TEKNOLOGI INDUSTRI	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	7	8%
689	BENDAHARA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	7	8%
690	ANALIS RETRIBUSI DAERAH	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	7	8%
691	PENATA LAPORAN KEUANGAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	7	8%
692	ANALIS KENELAYANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	7	8%
693	PENGELOLA PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	7	8%
694	ANALIS KENELAYANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	7	8%
695	ANALIS BUDIDAYA PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	7	8%
696	ANALIS PEMASARAN DAN KERJASAMA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	7	8%
697	ANALIS MUTU PRODUK	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	7	8%
698	ANALIS LAYANAN UMUM	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7	8%
699	PENATA LAPORAN KEUANGAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7	8%
700	BENDAHARA	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7	8%
701	ANALIS HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7	8%
702	ANALIS WAWASAN KEBANGSAAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7	8%
703	ANALIS KELEMBAGAAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7	8%
704	ANALIS ORGANISASI MASYARAKAT	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7	8%
705	ANALIS PARTAI POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7	8%
706	BENDAHARA	INSPEKTORAT	7	8%
707	PEMERIKSA LAPORAN DAN TRANSAKSI KEUANGAN	INSPEKTORAT	7	8%
708	BENDAHARA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	7	8%
709	PENYUSUN PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NONFORMAL	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	7	8%
710	ANALIS PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NONFORMAL	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	7	8%
711	PERANCANG SISTEM INFORMASI PENILAIAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	7	8%
712	ANALIS INFORMASI PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	7	8%
713	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	7	8%
714	ANALIS INFORMASI KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	7	8%
715	ANALIS LAYANAN UMUM	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7	8%
716	BENDAHARA	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7	8%

717	ANALIS PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7	8%
718	PENGAWAS PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7	8%
719	ANALIS DATA DAN INFORMASI	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7	8%
720	ANALIS PERIZINAN LAYANAN JASA	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7	8%
721	ANALIS PENGADUAN MASYARAKAT	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7	8%
722	ANALIS PENYULUHAN DAN LAYANAN INFORMASI	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7	8%
723	PENATA LAPORAN KEUANGAN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7	8%
724	BENDAHARA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7	8%
725	ANALIS BENCANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7	8%
726	PENELAAH BAHAN KAJIAN BENCANA ALAM	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7	8%
727	ANALIS PENANGGULANGAN KRISIS	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7	8%
728	PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN LOGISTIK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7	8%
729	PENYUSUN RENCANA REHABILITASI	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7	8%
730	ANALIS PERENCANAAN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7	8%
731	BENDAHARA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	7	8%
732	PENATA LAPORAN KEUANGAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	7	8%
733	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	7	8%
734	POLISI PAMONG PRAJA PELAKSANA LANJUTAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	7	8%
735	ANALIS KERJASAMA APARAT PENEGAK HUKUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	7	8%
736	ANALIS DATA DAN INFORMASI	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	7	8%
737	PENYUSUN KERJASAMA PELATIHAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	7	8%
738	ANALIS KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	7	8%
739	BENDAHARA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	7	8%
740	PENATA LAPORAN KEUANGAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	7	8%
741	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	7	8%
742	PERAWAT MAHIR	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	7	8%
743	BIDAN PELAKSANA LANJUTAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	7	8%
744	ASISTEN APOTEKER PELAKSANA LANJUTAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	7	8%
745	PEREKAM MEDIS PELAKSANA LANJUTAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	7	8%

746	RADIOGRAFER PELAKSANA LANJUTAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	7	8%
747	SANITARIAN PELAKSANA LANJUTAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	7	8%
748	TEKNISI ELEKTROMEDIS MAHIR	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	7	8%
749	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT PELAKSANA LANJUTAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	7	8%
750	ASISTEN PENATA ANESTESI MAHIR	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	7	8%
751	NUTRISIONIS PELAKSANA LANJUTAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	7	8%
752	FISIOTERAPIS PELAKSANA LANJUTAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	7	8%
753	EPIDEMIOLOG KESEHATAN PELAKSANA LANJUTAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	7	8%
754	ENTOMOLOG KESEHATAN PELAKSANA LANJUTAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	7	8%
755	OKUPASI TERAPIS PELAKSANA LANJUTAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	7	8%
756	PERAWAT GIGI/ TERAPIS GIGI DAN MULUT MAHIR	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	7	8%
757	PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN LOGISTIK	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	7	8%
758	ANALIS TATA USAHA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	7	8%
759	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	7	8%
760	ANALIS LAPORAN KEUANGAN	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	7	8%
761	BENDAHARA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	7	8%
762	PENGAWAS MONITORING DAN EVALUASI IMUNISASI PUSKESMAS	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	7	8%
763	ANALIS PENYAKIT MENULAR	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	7	8%
764	PERAWAT MAHIR	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	7	8%
765	BIDAN MAHIR	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	7	8%
766	ASISTEN APOTEKER MAHIR	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	7	8%
767	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN MAHIR	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	7	8%
768	ANALIS PEMBAYARAN JAMINAN KESEHATAN	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	7	8%
769	ANALIS PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MEDIS	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	7	8%
770	ANALIS PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	7	8%
771	ANALIS INFORMASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	7	8%
772	ANALIS PEMBAYARAN JAMINAN KESEHATAN	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	7	8%
773	ANALIS GIZI	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	7	8%
774	PENYUSUN MEKANISME OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	7	8%
775	ANALIS KELUARGA BERENCANA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	7	8%



776	ANALIS MEKANISME OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	7	8%
777	PENYUSUN MEKANISME OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	7	8%
778	ANALIS DATA DAN INFORMASI	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	7	8%
779	PENYUSUN MEKANISME OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	7	8%
780	BENDAHARA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	7	8%
781	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	7	8%
782	PENYUSUN RENCANA PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	7	8%
783	ANALIS PEMBANGUNAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	7	8%
784	PENYUSUN RENCANA PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	7	8%
785	ANALIS KESEJAHTERAAN RAKYAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	7	8%
786	PENYUSUN PROGRAM PENGAWASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	7	8%
787	ANALIS LAYANAN UMUM	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	7	8%
788	ANALIS PELAYANAN SOSIAL	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	7	8%
789	ANALIS PENGAWASAN MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	7	8%
790	ANALIS PENINDAKAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	7	8%
791	ANALIS HASIL PENGAWASAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	7	8%
792	BENDAHARA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	7	8%
793	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	7	8%
794	PENYUSUN RENCANA PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	7	8%
795	ANALIS PEMBANGUNAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	7	8%
796	PENYUSUN RENCANA PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	7	8%
797	ANALIS KESEJAHTERAAN RAKYAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	7	8%
798	PENYUSUN PROGRAM PENGAWASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	7	8%
799	ANALIS LAYANAN UMUM	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	7	8%
800	ANALIS PELAYANAN SOSIAL	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	7	8%
801	ANALIS PENGAWASAN MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	7	8%
802	ANALIS PENINDAKAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	7	8%
803	ANALIS HASIL PENGAWASAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	7	8%

804	BENDAHARA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	7	8%
805	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	7	8%
806	PENYUSUN RENCANA PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	7	8%
807	ANALIS PEMBANGUNAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	7	8%
808	PENYUSUN RENCANA PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	7	8%
809	ANALIS KESEJAHTERAAN RAKYAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	7	8%
810	PENYUSUN PROGRAM PENGAWASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	7	8%
811	ANALIS LAYANAN UMUM	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	7	8%
812	ANALIS PELAYANAN SOSIAL	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	7	8%
813	ANALIS PENGAWASAN MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	7	8%
814	ANALIS PENINDAKAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	7	8%
815	ANALIS HASIL PENGAWASAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	7	8%
816	BENDAHARA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	7	8%
817	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	7	8%
818	PENYUSUN RENCANA PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	7	8%
819	ANALIS PEMBANGUNAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	7	8%
820	PENYUSUN RENCANA PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	7	8%
821	ANALIS KESEJAHTERAAN RAKYAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	7	8%
822	PENYUSUN PROGRAM PENGAWASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	7	8%
823	ANALIS LAYANAN UMUM	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	7	8%
824	ANALIS PELAYANAN SOSIAL	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	7	8%
825	ANALIS PENGAWASAN MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	7	8%
826	ANALIS PENINDAKAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	7	8%
827	ANALIS HASIL PENGAWASAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	7	8%
828	BENDAHARA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	7	8%
829	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	7	8%
830	PENYUSUN RENCANA PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	7	8%
831	ANALIS PEMBANGUNAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	7	8%
832	PENYUSUN RENCANA PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	7	8%

833	ANALIS KESEJAHTERAAN RAKYAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	7	8%
834	PENYUSUN PROGRAM PENGAWASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	7	8%
835	ANALIS LAYANAN UMUM	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	7	8%
836	ANALIS PELAYANAN SOSIAL	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	7	8%
837	ANALIS PENGAWASAN MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	7	8%
838	ANALIS PENINDAKAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	7	8%
839	ANALIS HASIL PENGAWASAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	7	8%
840	BENDAHARA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	7	8%
841	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	7	8%
842	PENYUSUN RENCANA PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	7	8%
843	ANALIS PEMBANGUNAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	7	8%
844	PENYUSUN RENCANA PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	7	8%
845	ANALIS KESEJAHTERAAN RAKYAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	7	8%
846	PENYUSUN PROGRAM PENGAWASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	7	8%
847	ANALIS LAYANAN UMUM	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	7	8%
848	ANALIS PELAYANAN SOSIAL	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	7	8%
849	ANALIS PENGAWASAN MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	7	8%
850	ANALIS PENINDAKAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	7	8%
851	ANALIS HASIL PENGAWASAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	7	8%
852	PENGELOLA UNIT LAYANAN PENGADAAN	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM	6	12%
853	PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM	6	12%
854	PENGELOLA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM	6	12%
855	PENGELOLA INFORMASI PRODUK HUKUM	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM	6	12%
856	PENGELOLA FASILITASI BANTUAN HUKUM	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM	6	12%
857	PENGELOLA PERTANAHAN	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM	6	12%
858	PENGELOLA RENCANA PEMERINTAHAN UMUM	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM	6	12%
859	PENGELOLA DATA TATA ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM	6	12%
860	PRANATA KEARSIPAN	ASISTEN II BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEHUMASAN	6	12%
861	PRANATA KEARSIPAN	ASISTEN II BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEHUMASAN	6	12%

862	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	ASISTEN II BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEHUMASAN	6	12%
863	PRANATA BARANG DAN JASA	ASISTEN II BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEHUMASAN	6	12%
864	TEKNISI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA	ASISTEN II BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEHUMASAN	6	12%
865	PENGOLAH BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI	ASISTEN II BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEHUMASAN	6	12%
866	PENGELOLA DATA	ASISTEN II BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEHUMASAN	6	12%
867	PRANATA ACARA	ASISTEN II BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEHUMASAN	6	12%
868	PETUGAS PROTOKOL	ASISTEN II BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEHUMASAN	6	12%
869	PENGELOLA DOKUMENTASI	ASISTEN II BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEHUMASAN	6	12%
870	PENGOLAH DATA PELAYANAN	ASISTEN II BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEHUMASAN	6	12%
871	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	ASISTEN II BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEHUMASAN	6	12%
872	PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL	ASISTEN III BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6	12%
873	PENGELOLA KEGIATAN HARI BESAR KEAGAMAAN	ASISTEN III BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6	12%
874	PENGELOLA BANTUAN KEAGAMAAN	ASISTEN III BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6	12%
875	PENGOLAH DATA EKONOMI MAKRO	ASISTEN III BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6	12%
876	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	SEKRETARIAT DPRD	6	12%
877	PENGELOLA DATA ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI	SEKRETARIAT DPRD	6	12%
878	PENGOLAH DATA LAPORAN KEUANGAN	SEKRETARIAT DPRD	6	12%
879	PENGELOLA PERSIDANGAN	SEKRETARIAT DPRD	6	12%
880	PENGELOLA BARANG PERSEDIAAN	SEKRETARIAT DPRD	6	12%
881	PENGELOLA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	SEKRETARIAT DPRD	6	12%
882	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	SEKRETARIAT DPRD	6	12%
883	PRANATA KEARSIPAN	SEKRETARIAT DPRD	6	12%
884	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	SEKRETARIAT DPRD	6	12%
885	PENGELOLA RUMAH TANGGA	SEKRETARIAT DPRD	6	12%
886	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	SEKRETARIAT DPRD	6	12%
887	PRANATA ACARA	SEKRETARIAT DPRD	6	12%
888	PENGELOLA LAYANAN KEHUMASAN	SEKRETARIAT DPRD	6	12%
889	PETUGAS PROTOKOL	SEKRETARIAT DPRD	6	12%

890	PENGELOLA LAPORAN DATA PENERIMAAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6	12%
891	PRANATA KEARSIPAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6	12%
892	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6	12%
893	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6	12%
894	PENGELOLA AKUNTANSI	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6	12%
895	PENGOLAH DATA SISTEM AKUNTANSI	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6	12%
896	PENGELOLA PENDAFTARAN, PENDATAAN PAJAK, DAN RETRIBUSI	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6	12%
897	PENGELOLA RETRIBUSI DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6	12%
898	PENGOLAH DATA PENAGIHAN PAJAK	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6	12%
899	PENGELOLA DATA ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6	12%
900	PENGELOLA LAPORAN DATA PENERIMAAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6	12%
901	PENGELOLA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6	12%
902	PENGELOLA GAJI	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6	12%
903	PENGELOLA PERBENDAHARAAN DAN PELAYANAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6	12%
904	PENGELOLA TRANSFER	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6	12%
905	PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DESA	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6	12%
906	PENGELOLA ANGGARAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6	12%
907	PENGELOLA PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBD	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6	12%
908	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	6	12%
909	PRANATA KEARSIPAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	6	12%
910	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	6	12%
911	PENGELOLA DATABASE	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	6	12%
912	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	6	12%
913	PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	6	12%
914	PENGELOLA DISIPLIN PEGAWAI	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	6	12%
915	PENGELOLA PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	6	12%
916	PENGELOLA PENYELENGGARAAN DIKLAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	6	12%
917	PENGOLAH DATA LAPORAN KEUANGAN	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	6	12%
918	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	6	12%

919	PRANATA KEARSIPAN	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	6	12%
920	PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	6	12%
921	PENGELOLA DATABASE	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	6	12%
922	PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	6	12%
923	PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	6	12%
924	PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	6	12%
925	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	DINAS PERHUBUNGAN	6	12%
926	PENGELOLA LAPORAN DATA PENERIMAAN	DINAS PERHUBUNGAN	6	12%
927	PENGELOLA REALISASI LAPORAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH	DINAS PERHUBUNGAN	6	12%
928	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	DINAS PERHUBUNGAN	6	12%
929	PENGELOLA DATA JARINGAN TRANSPORTASI JALAN	DINAS PERHUBUNGAN	6	12%
930	PENGELOLA SERTIFIKASI KOMPETENSI PENILAI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS	DINAS PERHUBUNGAN	6	12%
931	PENGELOLA PERIZINAN ANGKUTAN JALAN	DINAS PERHUBUNGAN	6	12%
932	PENGELOLA SISTEM INFORMASI SARANA DAN PRASARANA JALAN	DINAS PERHUBUNGAN	6	12%
933	PENGATUR LALU LINTAS JALAN	DINAS PERHUBUNGAN	6	12%
934	PENGELOLA ANGGARAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6	12%
935	PRANATA KEARSIPAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6	12%
936	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6	12%
937	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6	12%
938	PENGELOLA LAPORAN DATA PENERIMAAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6	12%
939	OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (OPERATOR SIAK) TERMAPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6	12%
940	PENGELOLA MUTASI PENDUDUK	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6	12%
941	OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (OPERATOR SIAK) TERMAPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6	12%
942	PENGELOLA DATABASE	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6	12%
943	PENGELOLA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6	12%
944	OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (OPERATOR SIAK) TERMAPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6	12%

945	PENGELOLA PENGADUAN PUBLIK	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6	12%
946	PENGELOLA DATA	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6	12%
947	PENGELOLA DOKUMENTASI	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6	12%
948	PENGELOLA KEUANGAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	6	12%
949	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	6	12%
950	PRANATA KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	6	12%
951	PENGELOLA BAHAN PUSTAKA	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	6	12%
952	PRANATA KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	6	12%
953	PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	6	12%
954	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6	12%
955	PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6	12%
956	PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6	12%
957	PENGELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6	12%
958	PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6	12%
959	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	6	12%
960	PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	6	12%
961	PENYULUH PERTANIAN TERAMPIL	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	6	12%
962	PENGELOLA ORGANISME PENGANGGU TANAMAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	6	12%
963	PENGELOLA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	6	12%
964	PENGELOLA DATABASE KELEMBAGAAN PETANI	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	6	12%
965	PENGELOLA PERLINDUNGAN TANAMAN DAN PENGELOLAAN HASIL PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	6	12%
966	PENGELOLA BUDIDAYA DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	6	12%
967	PENGELOLA KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	6	12%
968	PENGELOLA KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	6	12%

969	PARAMEDIK VETERINER TERAMPIL	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	6	12%
970	PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	6	12%
971	PENGELOLA BUDIDAYA PENGEMBANGAN TERNAK DAN HEWAN LAINNYA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	6	12%
972	PENGELOLA KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	6	12%
973	PENGELOLA PENDAPATAN	DINAS PARIWISATA	6	12%
974	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	DINAS PARIWISATA	6	12%
975	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	DINAS PARIWISATA	6	12%
976	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	DINAS PARIWISATA	6	12%
977	PENGELOLA OBJEK WISATA	DINAS PARIWISATA	6	12%
978	PENGELOLA USAHA KEPARIWISATAAN	DINAS PARIWISATA	6	12%
979	PENGELOLA DATA EDUKASI	DINAS PARIWISATA	6	12%
980	PENGELOLA PEMASARAN	DINAS PARIWISATA	6	12%
981	PENGELOLA USAHA PEMASARAN DAN PROMOSI WISATA	DINAS PARIWISATA	6	12%
982	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6	12%
983	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6	12%
984	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6	12%
985	PENGELOLA PEMELIHARAAN PERALATAN JALAN DAN JEMBATAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6	12%
986	PENGELOLA PERENCANAAN TEKNIS TATA BANGUNAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6	12%
987	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	6	12%
988	PENGELOLA BAHAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	6	12%
989	PENGOLAH BAHAN PERENCANAAN TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	6	12%
990	PRANATA KETRANSMIGRASIAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	6	12%
991	PENGELOLA KETRANSMIGRASIAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	6	12%
992	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6	12%
993	PRANATA LAPORAN KEUANGAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6	12%
994	PENGELOLA LAPORAN DATA PENERIMAAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6	12%
995	PENGELOLA LINGKUNGAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6	12%
996	PENGELOLA RENCANA ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6	12%
997	PENGELOLA LINGKUNGAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6	12%
998	TEKNISI LISTRIK DAN JARINGAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6	12%
999	PENGELOLA LIMBAH PENGUJIAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6	12%
1000	PENGELOLA LIMBAH	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6	12%



1001	PENGELOLA PENATAAN SAMPAH	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6	12%
1002	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	6	12%
1003	PRANATA LAPORAN KEUANGAN	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	6	12%
1004	PENGELOLA PENDIDIKAN	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	6	12%
1005	PENGELOLA PENATAAN SARANA DAN PRASARANA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	6	12%
1006	PENGELOLA BIMBINGAN TEKNIS STANDARDISASI KOMPETENSI	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	6	12%
1007	PENGELOLA PELAKSANAAN PROGRAM KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	6	12%
1008	PRANATA LAPORAN KEUANGAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6	12%
1009	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6	12%
1010	PENGELOLA PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL DAN LANSIA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6	12%
1011	PENGELOLA DATA BANTUAN SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6	12%
1012	PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6	12%
1013	PENGELOLA DATA KOMUNITAS ADAT	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6	12%
1014	PENGELOLA PENGUATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6	12%
1015	PENGELOLA PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6	12%
1016	PRANATA LAPORAN KEUANGAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6	12%
1017	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6	12%
1018	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6	12%
1019	PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6	12%
1020	PENGELOLA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6	12%
1021	PENGELOLA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6	12%
1022	PENGELOLA TATA RUANG DAN KONSERVASI KAWASAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6	12%
1023	PENGELOLA TATA RUANG DAN KONSERVASI KAWASAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6	12%
1024	PENGELOLA PENATAAN SARANA DAN PRASARANA	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6	12%
1025	PENGELOLA RENCANA PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6	12%
1026	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	6	12%

1027	PENGELOLA LAPORAN DATA PENERIMAAN	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	6	12%
1028	PENGELOLA EKSPOR HASIL USAHA INDUSTRI DAN USAHA PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	6	12%
1029	PENGELOLA PASAR	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	6	12%
1030	PENGELOLA RETRIBUSI DAERAH	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	6	12%
1031	PENGELOLA KEBIJAKAN KELEMBAGAAN KOPERASI	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	6	12%
1032	PENGELOLA PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA KECIL, MIKRO DAN MENENGAH	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	6	12%
1033	PENGELOLA SARANA PERINDUSTRIAN	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	6	12%
1034	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	6	12%
1035	PENGELOLA LAPORAN DATA PENERIMAAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	6	12%
1036	PENGELOLA DATABASE	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	6	12%
1037	PENGELOLA PENGAWASAN PEMBUDIDAYAAN IKAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	6	12%
1038	PENGELOLA PENGAWASAN PENGOLAHAN, PENGANGKUTAN DAN PEMASARAN IKAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	6	12%
1039	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	12%
1040	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	12%
1041	PENGOLAH DATA INTELIJEN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	12%
1042	PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	12%
1043	PENGELOLA BAHAN PENGUATAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	12%
1044	PENGELOLA ORGANISASI POLITIK DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	12%
1045	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	INSPEKTORAT	6	12%
1046	PENGELOLA DATA TEMUAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT	6	12%
1047	PENGELOLA EVALUASI TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN	INSPEKTORAT	6	12%
1048	PRANATA LAPORAN KEUANGAN	INSPEKTORAT	6	12%
1049	PRANATA KEARSIPAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6	12%
1050	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6	12%
1051	PENGOLAH DATA LAPORAN KEUANGAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6	12%
1052	PENGELOLA KALENDER PENDIDIKAN DASAR	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6	12%

1053	PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DASAR	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6	12%
1054	PENGELOLA DATA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6	12%
1055	PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN MENENGAH	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6	12%
1056	PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DASAR	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6	12%
1057	PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6	12%
1058	PENGELOLA DATA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6	12%
1059	PENGELOLA DATABASE PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6	12%
1060	PENGELOLA BANTUAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6	12%
1061	PENGELOLA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6	12%
1062	PENGELOLA RENCANA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6	12%
1063	PRANATA KEARSIPAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6	12%
1064	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6	12%
1065	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6	12%
1066	PRANATA LAPORAN KEUANGAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6	12%
1067	PENGELOLA KERJASAMA PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6	12%
1068	PENGELOLA DATA	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6	12%
1069	PENGELOLA PERIZINAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6	12%
1070	PENGELOLA BAHAN KETATALAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6	12%
1071	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6	12%
1072	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6	12%
1073	PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6	12%
1074	PENGELOLA DATA DAMPAK BENCANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6	12%
1075	PENGOLAH BAHAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6	12%
1076	PENGELOLA DATA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6	12%
1077	PENGELOLA KEBUTUHAN LOGISTIK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6	12%
1078	PENGELOLA REHABILITASI SOSIAL	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6	12%
1079	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	6	12%

1080	PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	6	12%
1081	POLISI PAMONG PRAJA PELAKSANA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	6	12%
1082	PENGELOLA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	6	12%
1083	PENGELOLA KETERTIBAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	6	12%
1084	PENGELOLA DATA KEMANAN DAN KETERTIBAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	6	12%
1085	PENGELOLA DATA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	6	12%
1086	PRANATA PEMADAM KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	6	12%
1087	PENGELOLA PENATAAN SARANA DAN PRASARANA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	6	12%
1088	PRANATA KEARSIPAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	12%
1089	PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	12%
1090	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	12%
1091	PENGELOLA KEBIDANAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	12%
1092	PENGELOLA KEFARMASIAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	12%
1093	PENGELOLA KEPERAWATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	12%
1094	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	12%
1095	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	12%
1096	PENGOLAH DATA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	12%
1097	PENGOLAH DATA PEMBAYARAN JAMINAN KESEHATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	12%
1098	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	12%
1099	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	12%
1100	PENGELOLA DATA LAYANAN INFORMASI DAN EDUKASI PUBLIK	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	12%
1101	PENGELOLA KEPERAWATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	12%
1102	PENGELOLA KEPERAWATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	12%
1103	PERAWAT TERAMPIL	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	12%
1104	BIDAN PELAKSANA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	12%
1105	ASISTEN APOTEKER PELAKSANA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	12%
1106	PEREKAM MEDIS PELAKSANA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	12%
1107	RADIOGRAFER PELAKSANA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	12%
1108	SANITARIAN PELAKSANA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	12%
1109	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	12%
1110	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT PELAKSANA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	12%
1111	ASISTEN PENATA ANESTESI TERAMPIL	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	12%
1112	NUTRISIONIS PELAKSANA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	12%
1113	FISIOTERAPIS PELAKSANA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	12%
1114	EPIDEMIOLOG KESEHATAN PELAKSANA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	12%
1115	ENTOMOLOG KESEHATAN PELAKSANA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	12%

1116	OKUPASI TERAPIS PELAKSANA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	12%
1117	PERAWAT GIGI/ TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	12%
1118	PENGELOLA KEBUTUHAN LOGISTIK	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6	12%
1119	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	6	12%
1120	PENGELOLA PENGAMATAN PENYAKIT DAN IMUNISASI	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	6	12%
1121	PENGELOLA PROGRAM IMUNISASI	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	6	12%
1122	PENGELOLA PENYAKIT TIDAK MENULAR	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	6	12%
1123	PENGELOLA PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	6	12%
1124	PENGELOLA PEMBERANTASAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	6	12%
1125	PENGELOLA PENYAKIT TIDAK MENULAR	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	6	12%
1126	PERAWAT TERAMPIL	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	6	12%
1127	BIDAN TERAMPIL	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	6	12%
1128	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	6	12%
1129	FISIOTERAPIS TERAMPIL	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	6	12%
1130	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	6	12%
1131	ASISTEN PENATA ANESTESI TERAMPIL	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	6	12%
1132	PENGELOLA KEBIDANAN	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	6	12%
1133	PENGELOLA DATA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	6	12%
1134	PENGELOLA PELAYANAN KESEHATAN	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	6	12%
1135	PENGOLAH DATA PEMBAYARAN JAMINAN KESEHATAN	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	6	12%
1136	PENGELOLA KEFARMASIAN	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	6	12%
1137	PENGELOLA DATA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	6	12%
1138	PENGELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	6	12%
1139	PENGELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	6	12%
1140	PENGELOLA PROGRAM GIZI	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	6	12%
1141	PENGELOLA BINA KESEJAHTERAAN KELUARGA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	6	12%
1142	PENGELOLA ADVOKASI KONSELING DAN PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	6	12%
1143	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	6	12%
1144	PENGELOLA PERANGKAT KECAMATAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	6	12%
1145	PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	6	12%

1146	PENGELOLA URUSAN AGAMA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	6	12%
1147	PENGELOLA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	6	12%
1148	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	6	12%
1149	PENGELOLA PERANGKAT KECAMATAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	6	12%
1150	PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	6	12%
1151	PENGELOLA URUSAN AGAMA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	6	12%
1152	PENGELOLA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	6	12%
1153	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	6	12%
1154	PENGELOLA PERANGKAT KECAMATAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	6	12%
1155	PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	6	12%
1156	PENGELOLA URUSAN AGAMA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	6	12%
1157	PENGELOLA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	6	12%
1158	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	6	12%
1159	PENGELOLA PERANGKAT KECAMATAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	6	12%
1160	PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	6	12%
1161	PENGELOLA URUSAN AGAMA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	6	12%
1162	PENGELOLA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	6	12%
1163	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	6	12%
1164	PENGELOLA PERANGKAT KECAMATAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	6	12%
1165	PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	6	12%
1166	PENGELOLA URUSAN AGAMA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	6	12%
1167	PENGELOLA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	6	12%
1168	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	6	12%
1169	PENGELOLA PERANGKAT KECAMATAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	6	12%
1170	PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	6	12%
1171	PENGELOLA URUSAN AGAMA	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	6	12%
1172	PENGELOLA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	6	12%
1173	PENGADMINISTRASI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM	5	14%
1174	PENGADMINISTRASI HUKUM	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM	5	14%
1175	PENGADMINISTRASI BATAS WILAYAH	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM	5	14%

1176	PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM	5	14%
1177	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	ASISTEN II BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEHUMASAN	5	14%
1178	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	ASISTEN II BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEHUMASAN	5	14%
1179	PENGOLAH INFORMASI DAN KOMUNIKASI	ASISTEN II BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEHUMASAN	5	14%
1180	PENGADMINISTRASI UMUM	ASISTEN II BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEHUMASAN	5	14%
1181	PENGADMINISTRASI UMUM	ASISTEN III BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	5	14%
1182	PENGADMINISTRASI UMUM	ASISTEN III BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	5	14%
1183	PENGADMINISTRASI RISALAH	SEKRETARIAT DPRD	5	14%
1184	PENGADMINISTRASI RAPAT	SEKRETARIAT DPRD	5	14%
1185	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	SEKRETARIAT DPRD	5	14%
1186	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	SEKRETARIAT DPRD	5	14%
1187	PENGADMINISTRASI UMUM	SEKRETARIAT DPRD	5	14%
1188	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5	14%
1189	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5	14%
1190	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5	14%
1191	PENGADMINISTRASI PAJAK	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5	14%
1192	PENGADMINISTRASI PENERIMAAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5	14%
1193	PEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5	14%
1194	PEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5	14%
1195	PENGADMINISTRASI PENERIMAAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5	14%
1196	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5	14%
1197	PENGADMINISTRASI ANGGARAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5	14%
1198	PENGADMINISTRASI ANGGARAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5	14%
1199	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	5	14%
1200	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	5	14%
1201	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	5	14%
1202	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	5	14%
1203	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5	14%
1204	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5	14%

1205	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5	14%
1206	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5	14%
1207	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5	14%
1208	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5	14%
1209	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	DINAS PERHUBUNGAN	5	14%
1210	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	DINAS PERHUBUNGAN	5	14%
1211	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	DINAS PERHUBUNGAN	5	14%
1212	PENGADMINISTRASI KECELAKAAN LLAJ	DINAS PERHUBUNGAN	5	14%
1213	PEMELIHARA PENERANGAN JALAN	DINAS PERHUBUNGAN	5	14%
1214	PENGADMINISTRASI LLAJ	DINAS PERHUBUNGAN	5	14%
1215	PENGADMINISTRASI ANGGARAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	14%
1216	PENGADMINISTRASI UMUM	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	14%
1217	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	14%
1218	PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	14%
1219	PENGADMINISTRASI DATA PENYAJIAN DAN PUBLIKASI	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	14%
1220	PENGADMINISTRASI AKTA PERKAWINAN, PERCERAIAN, PENGAKUAN, PENGANGKATAN DAN PENGESAHAN ANAK	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	14%
1221	PENGADMINISTRASI AKTA KELAHIRAN DAN KEMATIAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	14%
1222	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	5	14%
1223	PENGADMINISTRASIAN KEPEGAWAIAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	5	14%
1224	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	5	14%
1225	PENGADMINISTRASI PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	5	14%
1226	PENGADMINISTRASI PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	5	14%
1227	PENGADMINISTRASI UMUM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	14%
1228	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	14%
1229	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	14%
1230	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	14%
1231	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	14%
1232	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	14%



1233	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	5	14%
1234	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	5	14%
1235	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	5	14%
1236	PEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	5	14%
1237	OPERATOR MESIN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	5	14%
1238	PENYULUH PERTANIAN PEMULA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	5	14%
1239	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	5	14%
1240	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	5	14%
1241	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	DINAS PARIWISATA	5	14%
1242	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	DINAS PARIWISATA	5	14%
1243	PENGADMINISTRASI IZIN USAHA PARIWISATA	DINAS PARIWISATA	5	14%
1244	PENATA PAMERAN	DINAS PARIWISATA	5	14%
1245	PEMANDU WISATA	DINAS PARIWISATA	5	14%
1246	PRANATA TEKNOLOGI INFORMASI KOMPUTER	DINAS PARIWISATA	5	14%
1247	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5	14%
1248	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5	14%
1249	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5	14%
1250	TEKNISI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5	14%
1251	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5	14%
1252	TEKNISI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5	14%
1253	PENILIK JALAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5	14%
1254	PEMELIHARA JALAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5	14%
1255	TEKNISI GEDUNG ATAU BANGUNAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5	14%
1256	TEKNISI RANCANG BANGUN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5	14%
1257	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5	14%
1258	PENGADMINISTRASI PROGRAM DAN KERJASAMA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5	14%
1259	PENGADMINISTRASI KERJASAMA PELATIHAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5	14%
1260	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5	14%
1261	PENGADMINISTRASI BATAS WILAYAH	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5	14%

1262	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5	14%
1263	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5	14%
1264	TEKNISI LISTRIK DAN JARINGAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5	14%
1265	PRAMU TAMAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5	14%
1266	PRANATA TAMAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5	14%
1267	PRANATA PENGAMBILAN SAMPEL	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5	14%
1268	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	5	14%
1269	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	5	14%
1270	PENGAWAS OLAH RAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	5	14%
1271	PENGADMINISTRASI PELATIHAN	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	5	14%
1272	PELATIH ATLET	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	5	14%
1273	PENGADMINISTRASI KERJASAMA PELATIHAN	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	5	14%
1274	PENGADMINISTRASI PROGRAM DAN KERJASAMA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	5	14%
1275	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5	14%
1276	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5	14%
1277	PENGADMINISTRASI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG CACAT	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5	14%
1278	PENGADMINISTRASI REHABILITASI MASALAH SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5	14%
1279	PRANATA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5	14%
1280	PENGADMINISTRASI ANAK TERLANTAR	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5	14%
1281	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5	14%
1282	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5	14%
1283	TEKNISI GEDUNG ATAU BANGUNAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5	14%
1284	JURU SURVEI PERMUKIMAN PERUMAHAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5	14%
1285	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5	14%
1286	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	5	14%
1287	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	5	14%
1288	PENGADMINISTRASI KEBUTUHAN IMPOR	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	5	14%

1289	PENGADMINISTRASI NOTA PERHITUNGAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	5	14%
1290	PENGADMINISTRASI SARANA PENGEMBANGAN USAHA	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	5	14%
1291	PENGADMINISTRASI IZIN USAHA	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	5	14%
1292	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	5	14%
1293	TEKNISI KONSERVASI KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	5	14%
1294	TEKNISI PERIKANAN BUDIDAYA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	5	14%
1295	PENGADMINISTRASI IDENTIFIKASI PULAU- PULAU KECIL	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	5	14%
1296	PENGADMINISTRASI IDENTIFIKASI DAN EVALUASI SENTRA PENGOLAHAN PRODUK	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	5	14%
1297	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5	14%
1298	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5	14%
1299	PRANATA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5	14%
1300	PENGADMINISTRASI PROGRAM DAN KERJASAMA	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5	14%
1301	PENGADMINISTRASI PARTAI	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5	14%
1302	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	INSPEKTORAT	5	14%
1303	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	INSPEKTORAT	5	14%
1304	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	5	14%
1305	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	5	14%
1306	PENGADMINISTRASI KEPENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	5	14%
1307	PENGADMINISTRASI KEPENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	5	14%
1308	PENGADMINISTRASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	5	14%
1309	PENGADMINISTRASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	5	14%
1310	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5	14%
1311	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5	14%
1312	PENGADMINISTRASI AKSES PERMODALAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5	14%
1313	PENGADMINISTRASI IZIN USAHA	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5	14%
1314	PENGADMINISTRASI PENGADUAN PUBLIK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5	14%
1315	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5	14%
1316	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5	14%

1317	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5	14%
1318	PENGADMINISTRASI REHABILITASI MASALAH SOSIAL	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5	14%
1319	TEKNISI RANCANG BANGUN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5	14%
1320	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	5	14%
1321	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	5	14%
1322	POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	5	14%
1323	PRANATA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	5	14%
1324	PENGADMINISTRASI PELATIHAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	5	14%
1325	PENGEMUDI MOBIL PEMADAM KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	5	14%
1326	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	5	14%
1327	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	5	14%
1328	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	5	14%
1329	TEKNISI LABORATORIUM	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	5	14%
1330	TEKNISI LISTRIK, TELEPON, AC, DAN LIFT	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	5	14%
1331	JURU RAWAT JENAZAH	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	5	14%
1332	PENGADMINISTRASI GUDANG FARMASI	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	5	14%
1333	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA PEMULA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	5	14%
1334	PENGADMINISTRASI REKAM MEDIS DAN INFORMASI	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	5	14%
1335	PERAWAT PELAKSANA PEMULA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	5	14%
1336	BIDAN PELAKSANA PEMULA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	5	14%
1337	ASISTEN APOTEKER PELAKSANA PEMULA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	5	14%
1338	PEREKAM MEDIS PEMULA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	5	14%
1339	RADIOGRAFER PEMULA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	5	14%
1340	SANTARIAN PELAKSANA PEMULA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	5	14%
1341	TEKNISI ELEKTROMEDIS PEMULA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	5	14%
1342	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT PEMULA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	5	14%
1343	ASISTEN PENATA ANESTESI PEMULA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	5	14%
1344	NUTRISIONIS PEMULA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	5	14%
1345	FISIOTERAPIS PEMULA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	5	14%
1346	EPIDEMIOLOG KESEHATAN PELAKSANA PEMULA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	5	14%
1347	ENTOMOLOG KESEHATAN PELAKSANA PEMULA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	5	14%
1348	OKUPASI TERAPIS PEMULA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	5	14%
1349	PERAWAT GIGI PELAKSANA PEMULA / TERAPIS GIGI DAN MULUT PELAKSANA PEMULA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	5	14%

1350	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	5	14%
1351	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	5	14%
1352	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	5	14%
1353	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	5	14%
1354	BIDAN PEMULA	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	5	14%
1355	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	5	14%
1356	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	5	14%
1357	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	5	14%
1358	PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	5	14%
1359	PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	5	14%
1360	PENGADMINISTRASI PERIZINAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	5	14%
1361	PRANATA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	5	14%
1362	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	5	14%
1363	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	5	14%
1364	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	5	14%
1365	PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	5	14%
1366	PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	5	14%
1367	PENGADMINISTRASI PERIZINAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	5	14%
1368	PRANATA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	5	14%
1369	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	5	14%
1370	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	5	14%
1371	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	5	14%
1372	PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	5	14%
1373	PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	5	14%
1374	PENGADMINISTRASI PERIZINAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	5	14%
1375	PRANATA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	5	14%
1376	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	5	14%
1377	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	5	14%
1378	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	5	14%
1379	PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	5	14%

1380	PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	5	14%
1381	PENGADMINISTRASI PERIZINAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	5	14%
1382	PRANATA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	5	14%
1383	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	5	14%
1384	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	5	14%
1385	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	5	14%
1386	PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	5	14%
1387	PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	5	14%
1388	PENGADMINISTRASI PERIZINAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	5	14%
1389	PRANATA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	5	14%
1390	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	5	14%
1391	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	5	14%
1392	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	5	14%
1393	PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	5	14%
1394	PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	5	14%
1395	PENGADMINISTRASI PERIZINAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	5	14%
1396	PRANATA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	5	14%
1397	PENGEMUDI AMBULAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	4	10%
1398	PENGEMUDI	SEKRETARIAT DPRD	3	10%
1399	PENGEMUDI	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3	10%
1400	PENAGIH RETRIBUSI	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3	10%
1401	PENGEMUDI	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	3	10%
1402	PENGEMUDI	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3	10%
1403	PENAGIH RETRIBUSI	DINAS PERHUBUNGAN	3	10%
1404	PENGEMUDI	DINAS PERHUBUNGAN	3	10%
1405	PENGEMUDI	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3	10%
1406	PENGEMUDI	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	3	10%
1407	PENGEMUDI	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3	10%
1408	PENGEMUDI	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	3	10%
1409	PENGEMUDI	DINAS PARIWISATA	3	10%
1410	PENGEMUDI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3	10%
1411	PENGEMUDI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3	10%

1412	PENGEMUDI	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3	10%
1413	PENGEMUDI	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	3	10%
1414	PENGEMUDI	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3	10%
1415	PENGEMUDI	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3	10%
1416	PENGEMUDI	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	3	10%
1417	PENGEMUDI	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3	10%
1418	PENGEMUDI	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3	10%
1419	PENGEMUDI	INSPEKTORAT	3	10%
1420	PENGEMUDI	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3	10%
1421	PENGEMUDI	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3	10%
1422	PENGEMUDI	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3	10%
1423	PENGEMUDI	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	3	10%
1424	BINATU RUMAH SAKIT	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	3	10%
1425	PENGEMUDI	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	3	10%
1426	PENGEMUDI	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	3	10%
1427	PENGEMUDI	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	3	10%
1428	PENGEMUDI	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	3	10%
1429	PENGEMUDI	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	3	10%
1430	PENGEMUDI	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	3	10%
1431	PRAMU KEBERSIHAN	SEKRETARIAT DPRD	1	10%
1432	PRAMU KEBERSIHAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1	10%
1433	PRAMU KEBERSIHAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	10%
1434	PRAMU KEBERSIHAN	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	10%
1435	PRAMU KEBERSIHAN	DINAS PERHUBUNGAN	1	10%
1436	PRAMU KEBERSIHAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	10%
1437	PRAMU KEBERSIHAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	1	10%
1438	PRAMU KEBERSIHAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	10%
1439	PRAMU KEBERSIHAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI	1	10%
1440	PRAMU KEBERSIHAN	DINAS PARIWISATA	1	10%
1441	PRAMU KEBERSIHAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	10%
1442	PRAMU KEBERSIHAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	10%

1443	PRAMU KEBERSIHAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	10%
1444	PRAMU KEBERSIHAN	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	10%
1445	PRAMU KEBERSIHAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	10%
1446	PRAMU KEBERSIHAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1	10%
1447	PRAMU KEBERSIHAN	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	1	10%
1448	PRAMU KEBERSIHAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	10%
1449	PRAMU KEBERSIHAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	10%
1450	PRAMU KEBERSIHAN	INSPEKTORAT	1	10%
1451	PRAMU KEBERSIHAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	10%
1452	PRAMU KEBERSIHAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1	10%
1453	PRAMU KEBERSIHAN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	10%
1454	PRAMU KEBERSIHAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1	10%
1455	PRAMU KEBERSIHAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	1	10%
1456	PRAMU KEBERSIHAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT	1	10%
1457	PRAMU KEBERSIHAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI PULAU RAO	1	10%
1458	PRAMU KEBERSIHAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI JAYA	1	10%
1459	PRAMU KEBERSIHAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI SELATAN	1	10%
1460	PRAMU KEBERSIHAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI UTARA	1	10%
1461	PRAMU KEBERSIHAN	KANTOR KECAMATAN MOROTAI TIMUR	1	10%

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS



LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI  
 NOMOR 10 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN  
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL  
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

**BASIC TTP ASN KABUPATEN PULAU MOROTAI**

<b>KELAS JABATAN</b>	<b>RP BPK (RP)</b>	<b>INDEK S TPP</b>	<b>TPP DASAR (RP)</b>	<b>TPP YANG DI BAYARKAN (RP)</b>
15	29.286.000,00	0,5513	16.145.955,14	30.000.0000,00
14	22.295.000,00	0,5513	12.291.677,59	10.400.000,00
13	20.010.000,00	0,5513	11.031.911,57	7.000.000,00
12	16.000.000,00	0,5513	8.821.118,70	6.300.000,00
11	12.370.000,00	0,5513	6.819.827,40	5.000.000,00
10	10.760.000,00	0,5513	5.932.202,33	4.500.000,00
9	9.360.000,00	0,5513	5.160.354,44	3.500.000,00
8	7.523.000,00	0,5513	4.147.579,75	2.950.000,00
7	6.633.000,00	0,5513	3.656.905,02	2.650.000,00
6	5.764.000,00	0,5513	3.177.808,01	2.100.000,00
5	4.807.000,00	0,5513	2.650.194,85	1.150.000,00
4	2.849.000,00	0,5513	1.570.710,45	1.125.000,00
3	2.354.000,00	0,5513	1.297.807,09	1.100.000,00
2	1.947.000,00	0,5513	1.073.419,88	1.050.000,00
1	1.540.000,00	0,5513	849.032,67	650.000,00

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS